

**PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MENANGGAPI ISU  
DISKRIMINASI MUSLIM *UYGHUR* DI TIONGGOK TAHUN 2018-2020**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**MUAF ALI SAIDI**

15323107

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MENANGGAPI ISU  
DISKRIMINASI MUSLIM *UYGHUR* DI TIONGGOK TAHUN 2018-2020**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**MU'AF ALI SAIDI**

15323107

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MENANGGAPI ISU  
DISKRIMINASI MUSLIM UYGHUR DI TIONGKOK TAHUN 2018-  
2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

16 November 2022

Mengesahkan

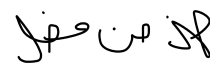
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
- 3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

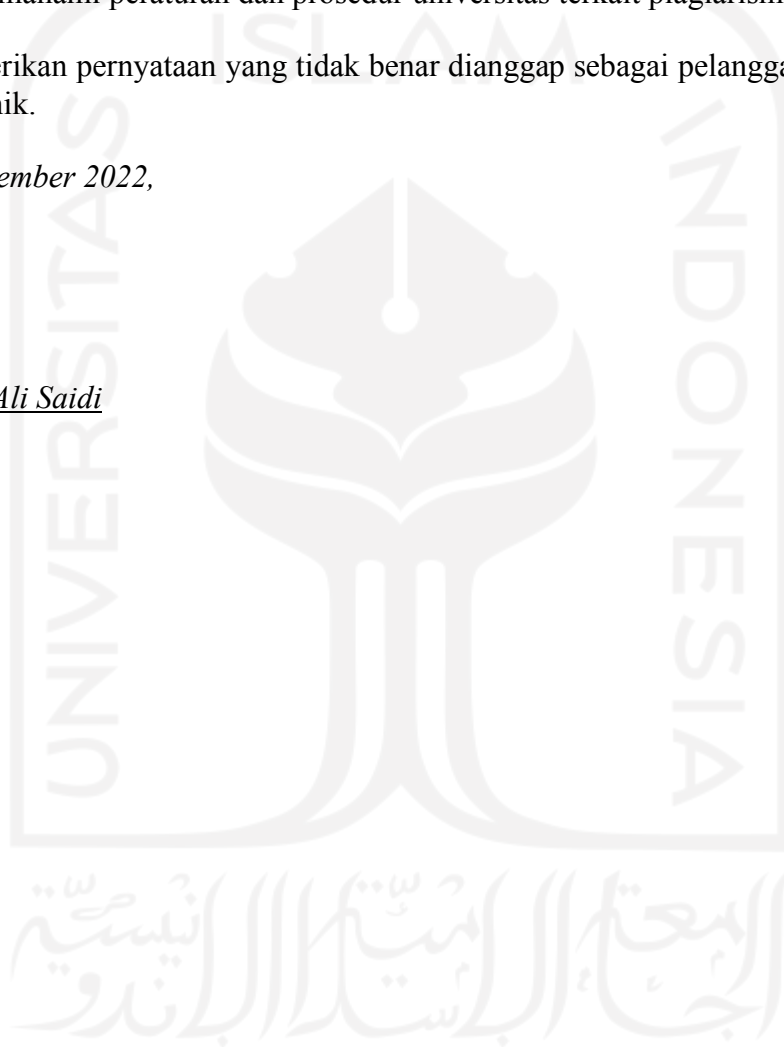
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*16 November 2022,*

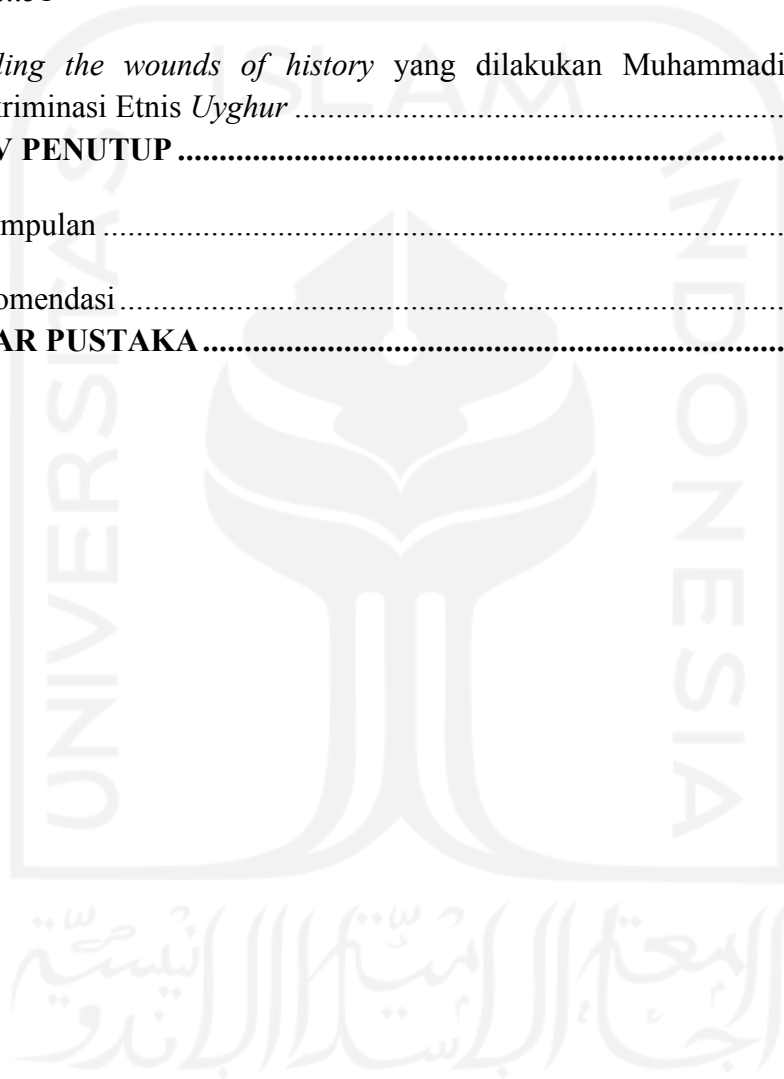
*Mu'af Ali Saidi*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian .....	7
1.5 Tinjauan Pustaka .....	8
1.6 Kerangka Pemikiran .....	10
1.7 Argumen Sementara .....	14
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian .....	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....	15
1.8.4 Metode Analisis Data.....	16
1.9 Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II DISKRIMINASI ETNIS <i>UYGHUR</i> DAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN PERDAMAIAN DUNIA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Diskriminasi Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis <i>Uyghur</i> .....	19
2.2 Gerakan Muhammadiyah sebagai Organisasi Perdamaian Dunia .....	27
2.3 Dukungan Pemerintah dan Upaya yang dilakukan Muhammadiyah terhadap Diskriminasi Etnis <i>Uyghur</i> .....	30
<b>BAB III PERAN MUHAMMADIYAH TERHADAP DISKRIMINASI ETNIS <i>UYGHUR</i> MENGGUNAKAN <i>FAITH-BASED DIPLOMACY</i>.....</b>	<b>40</b>

3.1	<i>Offering a New Vision</i> yang dilakukan Muhammadiyah terhadap Diskriminasi Etnis <i>Uyghur</i> .....	41
3.2	<i>Building Bridges</i> yang dilakukan Muhammadiyah terhadap Diskriminasi Etnis <i>Uyghur</i> .....	45
3.3	<i>Mediation</i> yang dilakukan Muhammadiyah terhadap Diskriminasi Etnis <i>Uyghur</i> .....	51
3.4	<i>Healing the wounds of history</i> yang dilakukan Muhammadiyah terhadap Diskriminasi Etnis <i>Uyghur</i> .....	52
	<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
4.1	Kesimpulan .....	60
4.2	Rekomendasi .....	62
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>64</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah politik modern di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Xinjiang telah bergejolak dan seringkali penuh kekerasan. Tetapi gelombang protes publik yang baru dan bentrokan mematikan di kawasan itu selama seperempat abad terakhir bukan hanya manifestasi kontemporer dari budaya akan tetapi dapat menjadi bentuk diskriminasi dan kekerasan yang bisa bertahan lama. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa sarjana dan pejabat Tiongkok, mereka (*Uyghur*) bukanlah produk dari intrik asing. Sebaliknya, beberapa faktor telah berkontribusi pada konflik, struktur politik Xinjiang seharusnya dilihat sebagai salah satu akar penyebab kerusuhan. Nama lengkap unit teritorial wilayah tersebut adalah “Daerah Otonomi *Uyghur* Xinjiang”, menunjukkan bahwa orang *Uyghur* adalah populasi non-Han terbesar di Xinjiang yang sebagian besar mengatur diri mereka sendiri. Bahkan, sistem yang secara resmi disebut-sebut memberikan otonomi di Xinjiang memberlakukan heteronomi (Rossabi, 2004). Heteronomi *Uyghur* sebagaimana yang di kemukakan oleh seorang filosof bernama Imanuel Kant merupakan sikap dalam bertindak dengan hanya sekedar mengikuti atural moral yang bersifat eksternal, suatu tindakan baik hanya karena sesuai dengan aturan moral dengan menggunakan prinsip pembiaran sesuatu selain hukum moral untuk menentukan apa yang mesti dilakukan dalam bertindak, dan disertai perasaan takut atau bersalah, (Keraf, 2000).

Sejak awal 2017, pemerintah Tiongkok telah melakukan kebijakan penghilangan, penahanan massal, dan pemenjaraan etnis *Uyghur* secara besar-besaran. Para ahli memperkirakan jumlah etnis *Uyghur* yang diasingkan di kamp-kamp antara 800.000 dan mungkin lebih dari 2 juta orang, menjadikan kampanye penahanan etnis yang paling besar sejak Perang Dunia kedua. Pada bulan Maret 2019, peneliti Adrian Zenz memperkirakan jumlah orang *Uyghur* dan Turki yang diasingkan mencapai 1,5 juta (Nebhay, 2019). Laporan tentang orang-orang yang selamat yang keluar dari kamp-kamp tersebut merupakan katalog kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengkhawatirkan, termasuk penyiksaan dan kematian dalam tahanan.

Sebagai bagian dari kampanye penindasan ini, pemerintah Tiongkok telah menargetkan intelektual *Uyghur*, yang didefinisikan dalam laporan ini sebagai dosen universitas, profesional, guru, jurnalis, mahasiswa, seniman, dan masyarakat umum lainnya atau individu terkemuka. Penelitian yang dilakukan oleh Sintash (2019) mendokumentasikan 386 kasus intelektual yang diketahui diasingkan, dihilangkan, atau dipenjara sejak tahun 2017, termasuk 101 mahasiswa dan 285 sarjana, seniman, dan jurnalis. Laporan ini adalah yang ketiga yang dimiliki UHRP (*Uyghur Human Rights Project*).

Keberadaan etnis *Uyghur* serta sejarah tentang kepentingan Tiongkok di Xinjiang sudah dicatat dalam sejarah sejak berabad-abad silam. Sumber resmi Tiongkok modern menyatakan bahwa Tiongkok telah memaksakan kedaulatannya terhadap Xinjiang sejak periode Kekaisaran Dinasti Han hingga saat ini. Bagaimanapun, didalam periode panjang selama 2000 tahun, kekuasaan Tiongkok



terhadap Xinjiang, dari penguasaan pertama terjadi pada masa Dinasti Han (101 SM) sampai penguasaan terakhir tahun 1876 pada masa Dinasti Qing, hanya sekitar 220 tahun Tiongkok bisa menguasai daerah tersebut (Elba, 2018). Sejak pemerintah Tiongkok membuat dan memberlakukan kebijakan untuk etnis *Uyghur*, yang dinilai mendiskriminasi etnis minoritas *Uyghur*, karena kebijakan yang dibuat lebih menekankan pada kebijakan untuk membatasi kebebasan dalam melakukan implementasi agama dan budaya yang dianut oleh etnis minoritas *Uyghur*.

Terlebih sejak penemuan ladang minyak yang membuat posisi Xinjiang lebih bernilai ekonomi yang membuat pemerintah Tiongkok tidak mau melepaskan wilayah Xinjiang begitu saja. Xinjiang juga kaya akan sumber daya energi yang memiliki cadangan minyak, gas alam dan batu bara, dengan cadangan batu bara sebesar 40%. Cadangan minyak dan gas yang ditemukan di Tarim, Junggar, dan Turpan-Hami di bagian wilayah Xinjiang memiliki masing-masing seperempat dan sepertiga dari total Negara (HKTDC Research, 2019). Hal ini penting untuk Tiongkok dan membuat Tiongkok ingin mempertahankan wilayah Xinjiang agar tetap menjadi bagian dari Tiongkok karena Xinjiang dinilai memiliki potensi ekonomi yang unggul dan sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara-negara di Asia Tengah yang membuat Xinjiang masuk kedalam Jalur Sutra Tiongkok.

Etnis *Uyghur* yang mengakomodasi diri mereka sendiri dengan janji yang lebih rendah ini berharap untuk membalikkan warisan beberapa dekade terakhir di bawah pemerintahan Han. Para pejabat Tiongkok dengan arogan mengharapkan orang *Uyghur* untuk mengadopsi budaya dan bahasa Han, jika mereka ingin

berhasil, meskipun mereka juga meragukan kemampuan sebagian besar orang untuk melakukannya. Etnis *Uyghur* menghadapi eksploitasi ekonomi oleh pejabat serakah dan pedagang Han dan Hui (Muslim berbahasa Tiongkok) yang kejam. Pajak yang terlalu tinggi, korupsi yang merajalela, dan harga barang impor yang tinggi membuat banyak orang *Uyghur* dan wilayah tersebut secara keseluruhan terperosok dalam kemiskinan (Bovingdon, 2004).

Pemaknaan K.H Ahmad Dahlan pada QS. Ali Imran 104 dititikberatkan tentang pentingnya sebuah perkumpulan yang terorganisir dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan yang terorganisir mampu menjangkau banyak aspek. Sedangkan pada ayat 110, sebagai perwujudan umat terbaik maka tugas umat islam melakukan proses Transendensi (seruan kepada Allah), Liberasi (pembebasan manusia dari bentuk penjajahan terhadap materi), dan Humanisasi (menjadikan manusia untuk peka terhadap manusia), ketiga proses tersebut dalam pemikiran Kuntowijoyo disebut sebagai kesadaran Profetik. Sedang pada makna surah Al Maun dan Ashr, K.H Ahmad Dahlan, dalam kisah yang masyhur, menjelaskan pentingnya peduli pada kemanusiaan dan memanfaatkan waktu untuk senantiasa memberikan nasehat dan beramal shaleh. Berbagai banyak organisasi yang ikut andil dalam perdamaian internasional tak lepas dari satu organisasi terbesar dunia yakni OKI, akan tetapi perlu melihat sebuah Gerakan keagamaan dalam negara yang mayoritas islam terbesar di dunia salah satunya Muhammadiyah.

Salah satu Gerakan Keagamaan di Indonesia, Muhammadiyah mengecam tindakan pemerintah Tiongkok terkait diskriminasi terhadap etnis muslim *Uyghur*.

Dalam konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah mengatakan, Muhammadiyah bergerak di ranah kemanusiaan, moral sebagai kekuatan Islam. Adapun penyertaan resmi pandangan mereka terkait isu di *Uyghur*:

*”Mendesak kepada Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan Masyarakat Uyghur, Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uyghur atas dalih apapun dan pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah Uyghur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uyghur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas (Persada, 2019).*

Meskipun Tiongkok sudah menetapkan beberapa peraturan maupun Undang-Undang pada tahun 1984 terkait Otonomi Daerah untuk mencapai sebuah persamaan hak minoritas. Akan tetapi melihat kasus *Uyghur*, undang-undang tersebut belum berhasil di jalankan. Beberapa kebijakan yang tertulis dalam undang-undang tersebut, yakni kebijakan tentang pendidikan, bahasa minoritas, dan kebebasan untuk memeluk agama masing-masing. Kebijakan tersebut tercantum dalam Undang-undang Etnis Daerah dan merupakan bentuk dari diterapkannya ICERD (*International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) di Tiongkok. Tidak hanya minoritas Etnis *Uyghur* yang terkena diskriminasi, melainkan beberapa etnis lainnya seperti Etnis Mongoloia dan Tibet. Sehingga Tiongkok secara garis besar tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap penduduknya di kasus perlindungan dari kejahatan massal karena Tiongkok melanggar tanggung jawabnya dengan melakukan tindakan rasial diskriminasi.

Diskriminasi yang terjadi di Xinjiang oleh Pemerintah Tiongkok terhadap etnis *Uyghur* menjadi fokus Muhammadiyah dalam melakukan perdamaian. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah sejak tahun 1912 merupakan manifestasi dari ide dan amal perjuangan dari Muhammad Darwis atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan “K. H. Ahmad Dahlan”, sekaligus menjadi pendiri Gerakan Keagamaan tersebut. Sebagai ciri kaum muslimin memindai kebenaran ajaran ditengah perbedaan, maka Muhammadiyah tetap memelihara sikap *ruhama’u bainahum* (cinta kasih terhadap sesama), demi terwujudnya *Islam rahmatan lil alamin*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi *Faith-Based Diplomacy* yang dilakukan Muhammadiyah dalam menanggapi diskriminasi minoritas Etnis Muslim *Uyghur* di Tiongkok?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindakan Muhammadiyah dalam melihat diskriminasi minoritas Etnis Muslim *Uyghur* di Tiongkok.
2. Untuk mengetahui pokok permasalahan diskriminasi minoritas Etnis Muslim *Uyghur* di Tiongkok.
3. Untuk mengetahui mekanisme *faith-based diplomacy* yang dilakukan Muhammadiyah dalam menanggapi permasalahan diskriminasi minoritas Etnis Muslim *Uyghur* di Tiongkok.

#### 1.4 Cakupan penelitian

Batasan penulisan karya ilmiah ini terbatas pada pokok pembahasan peran Muhammadiyah dalam *faith-based diplomacy*. Alasan penulis mengambil tahun 2018-2020 adalah Muhammadiyah menemukan sebuah kejanggalan setelah berkunjung ke Xinjiang pada tahun 2018 seperti halnya "*kamp-kamp re-edukasi*" yang membatasi pergerakan mereka. Muhammadiyah memulai *faith-based diplomacy* sebagai upaya dalam mendamaikan konflik yang terjadi pada etnis minoritas Muslim *Uyghur* di Tiongkok pada awal 2018. Sedangkan pada tahun 2020 konflik antara pemerintah Tiongkok dan Etnis *Uyghur* sedikit meredah akibat banyaknya tekanan dari berbagai organisasi dan gerakan yang mendukung hak asasi manusia terkait konflik yang terjadi di Xinjiang.

Dalam upaya tersebut Muhammadiyah mencoba berbagai cara salah satunya melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat, pemerintah, ulama-ulama dan bahkan kunjungan ke Tiongkok. Tak terkecuali Muhammadiyah juga berupaya untuk berkomunikasi dengan Etnis *Uyghur* yang begitu sulit untuk ditemui karena batasan dari pemerintah Tiongkok.

Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini hanya membahas proses implementasi *faith-based diplomacy* bukan keberhasilan. Sehingga tidak ada indikator keberhasilan dalam teori tersebut.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa sumber yang berhubungan terkait diskriminasi etnis *Uyghur* di Tiongkok, serta peran Muhammadiyah dalam upaya membantu etnis *Uyghur*.

Claeke (2008) dalam tulisan yang berjudul *China's "War on Terror" in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent Uyghur Separatism*, Michael Clarke seorang doctor dari Griffith University melakukan sebuah penelitian terhadap etnis *Uyghur* pada waktu 1949-2006. Penelitian tersebut membahas tentang hubungan antara kelompok Terorisisme dengan etnis *Uyghur*. Penulis berasumsi bahwa pemberontakan di Xinjiang merupakan bentuk terorisme, Clarke menemukan bahwa pemberontakan tersebut berhubungan dengan beberapa kelompok terorisme Turki dan Afghanistan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan awal mula terjadinya diskriminasi di *Uyghur* menggunakan teori keamanan manusia terhadap terorisme.

Kasim, N. M., Towadi, M., & Bakung, D. A. (2020) dalam tulisan yang berjudul *The Organization of Islamic Cooperation Affects To China Through The Islamic Law Approach Addressing The Uyghur Conflict: Is It Possible?*. Menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan oleh OKI dalam menjalankan perannya di Tiongkok tentang masalah yang terjadi di *Uyghur*. Penelitian tersebut menggunakan metode yurisdiksi normative yang kemudian menunjukkan keterlibatan OKI walau sebenarnya Tiongkok telah membatasi aspek organisasi identitas keagamaan dan bangsa namun terdapat beberapa aspek dalam OKI yang memungkinkan OKI untuk bernegosiasi dengan

Tiongkok dengan menjunjung tinggi prinsip prinsip hukum islam tanpa membatasi kapasitas mereka sebagai organisasi internasional.

Rose Holder (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *On the Intersectionality of religious and Racial Discrimination: A Case Study on the Applicability of ICERD with Respect to China's Uyghur Muslim Minority*. Sebagai kebangsaan minoritas yang diakui secara resmi di Tiongkok, identitas agama unik *Uyghur* seolah-olah dilindungi di bawah hukum nasional Tiongkok. Pada kenyataannya, perlindungan semacam itu terbatas dalam praktiknya, dengan seringnya klaim oleh aktivis *Uyghur*, Gerakan Keagamaan hak asasi manusia, dan cendekiawan bahwa kebijakan pemerintah mengakibatkan diskriminasi agama penduduk *Uyghur* di Xinjiang.

Xiaogang Wu & Xi Song (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Ethnicity, Migration, and Social Stratification in China: Evidence from Xinjiang Uyghur Autonomous Region*. Ketika negara redistributif secara bertahap mundur dari bidang ekonomi untuk memberi tempat bagi pasar tenaga kerja yang kompetitif, masyarakat yang dulunya berada di bawah perlindungan kebijakan egaliter negara cenderung kalah dan menghadapi lebih banyak kerugian di pasar tenaga kerja. Prediksi ini diverifikasi oleh bukti empiris dari Xinjiang di Tiongkok Barat Laut berdasarkan analisis sampel dari sensus mini populasi pada tahun 2005. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tiongkok Han dan *Uyghur* dipisahkan ke dalam sektor ekonomi yang berbeda. Kesenjangan pendapatan Han-*Uyghur* dapat diabaikan di lembaga pemerintah atau publik, tetapi meningkat seiring dengan pemasaran sektor ketenagakerjaan.

Douglas M. Johnston (2009) dengan buku yang berjudul *Faith-Based Diplomacy: Bridging the Religious Divide*. Dan juga *Faith-Based Diplomacy: Trumping Real Politics* (2003). Johnston menjelaskan bahwa pusat dari banyak perselisihan yang terjadi menunjukkan agama menjadi akar penyebab konflik karena mungkin paling dekat dengan berada di Timur Tengah (di mana ada klaim agama yang bersaing untuk bagian wilayah yang sama), atau hanya rencana identitas dan kendaraan mobilisasi untuk hasrat nasionalis atau etnis (sebagai biasanya terjadi di Balkan).

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana *faith-based diplomacy* diterapkan oleh Muhammadiyah sebagai Gerakan Keagamaan Islam dalam menanggapi diskriminasi yang terjadi terhadap etnis *Uyghur* di Tiongkok. Tidak banyak penelitian yang meneliti bagaimana *faith-based diplomacy* diterapkan oleh Gerakan Keagamaan Islam. Namun pada penelitian ini penulis mencoba meneliti secara spesifik dampak konflik diskriminasi Etnis Muslim *Uyghur* dengan *faith-based Diplomacy* yang akan diterapkan oleh Muhammadiyah.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Untuk membahas peran Muhammadiyah dalam *faith-based diplomacy* terhadap konflik internal di Tiongkok, perlu adanya sebuah teori yang dapat mendeskripsikan secara tepat terhadap pembahasan tersebut. Hal tersebut akan mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan yang dipaparkan oleh penulis. Teori yang digunakan oleh penulis adalah *faith-based diplomacy*.

*Faith-based diplomacy* merupakan bentuk diplomasi *multi-track diplomacy* yang mengintegrasikan dinamika keyakinan agama dengan pelaksanaan



perdamaian internasional (Johnston, 2003). Dengan demikian, *faith-based diplomacy* merupakan tentang rekonsiliasi terhadap resolusi konflik. Perdamaian yang dikejanya bukan sekadar tidak adanya konflik, melainkan pemulihan hubungan yang sehat dan saling menghormati antara para pihak yang berkonflik. Sementara aktor *faith-based diplomacy* percaya bahwa diplomasi dan sistem internasional harus berlandaskan moral, mereka juga memahami perlunya pragmatisme dalam mengejar rekonsiliasi (Johnston, 2003).

Peran agama dalam proses diplomasi, menurut Johnston (2003), dapat membuka jendela ke realitas emosional dan spiritual yang lebih dalam dari mereka yang terlibat dalam konflik dan kehidupan negosiator sendiri. Oleh sebab itu, sinergitas aktor-aktor yang terkait dalam diplomasi, baik dari pemerintah maupun organisasi agama, sangat menentukan keberlangsungan dan keberterimaan nilai-nilai yang diusung. Pergeseran paradigma yang berkembang sebagai akibat dari peningkatan peran agama, sebagian berkaitan dengan fakta bahwa dukungan atau penentangan otoritas agama terhadap suatu konflik seringkali menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan kesimpulannya. Terdapat empat atribut yang harus dimiliki aktor diplomasi dalam memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menciptakan perdamaian, sebagai berikut (Johnston, 2003):

1. Memiliki pengaruh yang mapan dan meresap di masyarakat.
2. Memiliki reputasi sebagai kekuatan apolitis untuk perubahan berdasarkan seperangkat nilai dan norma yang dihormati.
3. Memiliki cara unik untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, termasuk kemampuan untuk memperbaiki hubungan diantara pihak yang berkonflik.

4. Memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan masyarakat, nasional, dan internasional untuk proses perdamaian.

Aktor dalam diplomasi ini melakukan pendekatan-pendekatan berdasarkan keyakinan mereka dan nilai-nilai universal kemanusiaan yang mereka miliki. Dengan nilai-nilai kebaikan tersebut mereka berperan dan berdiplomasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. Upaya perdamaian menggunakan *faith-based diplomacy* yang diperankan oleh aktor perdamaian memiliki beberapa bentuk dalam upaya perdamaian, sebagai berikut (Johnston, 2003):

1. *Offering a new vision* atau menawarkan nilai baru, di mana diplomat mendorong para pihak untuk merangkul realitas baru dan hubungan baru satu sama lain. Masing-masing agama besar dunia berisi seperangkat prinsip moral untuk mengatur hubungan manusia. Terkadang seruan pada prinsip-prinsip yang dianut bersama dapat menciptakan dinamika transenden untuk mengatasi hambatan sekuler dan bergerak menuju rekonsiliasi;
2. *Building bridges* atau membangun jembatan (hubungan), tugas yang melibatkan diplomat dalam membangun hubungan antara kelompok yang beragam sehingga mereka dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan aspirasi mereka masing-masing secara lebih efektif. Pembangunan jembatan mengasumsikan visi pluralistik untuk sebuah komunitas dan menyediakan kerangka kerja untuk menempa persatuan dari perbedaan tersebut. Ketika menyatukan kelompok yang berkonflik, diplomat berbasis agama memperhatikan prinsip dan tradisi spiritual sebagai dasar untuk membangun landasan agar bisa digunakan bersama;

3. *Mediation* atau mediasi, tujuannya ada tiga: untuk mengakhiri permusuhan, untuk menyelesaikan masalah yang mendasari konflik, dan untuk memulihkan hubungan. Pihak yang memiliki keyakinan agama sangat menghargai mediasi dalam menyelesaikan konflik. Melalui percakapan spiritual dengan pihak-pihak yang berkonflik, diplomat berbasis keyakinan mampu menembus hati dan mengungkapkan kepentingan dan nilai yang lebih dalam yang dapat menjadi dasar bagi penyelesaian konflik yang sedang berlangsung;
4. *Healing the wounds of history* atau menyembuhkan luka sejarah. Ini biasanya merupakan hasil dari peristiwa dalam memori institusional kolektif dari komunitas berbasis identitas, ingatan yang membawa rasa sakit dan penderitaan dan menghambat perkembangan yang sehat dari komunitas itu. Sampai luka-luka ini ditangani secara efektif, mereka pasti menimbulkan stereotip dan menjelek-jelekkan orang-orang yang menyebabkan luka. Hal ini, pada gilirannya, dapat berdampak buruk pada hubungan ke generasi mendatang. Selama salah satu atau kedua pihak tetap menjadi tawanan sejarah yang terluka, mereka tidak akan mampu menjangkau melampaui kepahitan dan rasa ketidakadilan mereka. Diplomat berbasis agama termasuk di antara yang paling siap untuk menghadapi situasi seperti ini. Ada sumber daya dalam tradisi keagamaan yang dapat memungkinkan penganutnya untuk: (1) merenungkan sejarah mereka dengan cara yang penebusan, (2) membawa makna dan martabat bagi penderitaan, dan (3) memberikan janji penyembuhan yang sejati.

## 1.7 Argumen Sementara

Beberapa catatan di atas, menegaskan bahwa *faith-based diplomacy* memiliki kerangka atribut yang merupakan karakteristik untuk memberikan pemimpin dan institusi agama pengaruh yang kuat dalam proses *peacemaking* yang tidak dimiliki oleh aktor diplomasi sekuler, yang menjelaskan bagaimana diplomasi dengan keistimewaan itu digunakan oleh aktor *faith-based diplomacy*. Upaya perdamaian menggunakan *faith-based diplomacy* yang diperankan oleh aktor perdamaian memiliki beberapa bentuk dalam upaya perdamaian, sebagai berikut (Johnston, 2003):

1. *Offering a new vision* atau menawarkan nilai baru.
2. *Building bridges* atau membangun jembatan (hubungan).
3. *Mediation* atau mediasi.
4. *Healing the wounds of history* atau menyembuhkan luka sejarah.

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebagai suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan data dan informasi dari berbagai macam sumber teori yang diperoleh dari kepustakaan untuk mendapatkan data yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal dan menarik minat serta menjadi penting bagi peneliti dan pembacanya (Arikunto, 2013). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana dalam penelitian ini datanya berasal dari literature-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dari penelitian yang berskala

nasional maupun internasional. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendapatkan data yang deskriptif yang berasal dari kata-kata tertulis atau lisan lalu dideskripsikan dengan kata-kata yang obyektif dan komprehensif.

### **1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang bagaimana Muhammadiyah sebagai Gerakan Keagamaan berperan dalam mengatasi permasalahan diskriminasi minoritas Etnis Muslim *Uyghur* di Tiongkok menggunakan *faith-based diplomacy*.

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data melalui metode studi dokumen atau jurnal. Studi dokumen atau jurnal sendiri adalah proses pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau jurnal-jurnal yang membahas tentang diskriminasi minoritas Etnis Muslim *Uyghur* di Tiongkok terlebih khususnya. Dan dokumen-dokumen yang diteliti mempunyai kegunaan untuk dijadikan sebagai bahan analisis. Studi dokumen menggunakan data sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

#### **1.8.3.1 Data Primer**

Merupakan data-data faktual mengenai kebijakan Muhammadiyah, data organisasi, badan hukum dan segala sesuatu yang bersifat fakta tentang pokok permasalahan yang diteliti. Data ini bisa didapatkan melalui website resmi dari lembaga tersebut, buku-buku yang membahas teori advokasi dan buku yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

### 1.8.3.2 Data Sekunder

Merupakan karya ilmiah orang lain yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang ingin diteliti dan bisa memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai pokok pembahasan. Data ini bisa didapatkan dari karya ilmiah orang lain yang berkaitan seperti jurnal, hasil penelitian, berita, internet dan lain sebagainya.

### 1.8.4 Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal-jurnal baik yang berskala nasional maupun internasional yang memiliki hubungan terkait masalah-masalah diskriminasi minoritas Etnis Muslim *Uyghur* di Tiongkok. Menurut Miles & Huberman (Sugiyono, 2015) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

#### 1.8.4.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

#### 1.8.4.2 Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulandan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

#### 1.8.4.3 Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan terbagi menjadi empat bab. Pada bab pertama, penulis akan menjelaskan latar belakang yang berisi tentang diskriminasi minoritas Etnis Muslim *Uyghur* di Tiongkok, gambaran Gerakan Keagamaan Muhammadiyah, dan *faith-based diplomacy*.

Kemudian pada bab dua, penulis akan menjelaskan tentang kesesuaian kondisi minoritas Etnis Muslim *Uyghur* di Tiongkok dan diskriminasi terhadap mereka. Kemudian Gerakan Keagamaan Muhammadiyah sebagai gerakan yang memiliki tujuan untuk perdamaian dunia.

Pada bab tiga, penulis akan masuk pada aplikasi teori *faith-based diplomacy* yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah. Proses diplomasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menjalankan perdamaian di Tiongkok adalah demi terciptanya Islam rahmatan lil alamin. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lengkap pada bab tiga.

Terakhir yaitu bab empat, pada bab ini akan ditulis sebuah kesimpulan bagaimana Muhammadiyah telah melakukan *faith-based diplomacy* terhadap diskriminasi minoritas Etnis Muslim *Uyghur* di Tiongkok. Bab ini sebagai penutup pada penelitian yang telah dilakukan penulis. Selain itu, skripsi ini membutuhkan saran guna menyempurnakan penelitian pada skripsi ini.



## **BAB II**

### **DISKRIMINASI ETNIS *UYGHUR* DAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN PERDAMAIAN DUNIA**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai gambaran secara umum penelitian ini dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Selanjutnya pada bab dua ini akan dijelaskan mengenai kesesuaian kondisi etnis *Uyghur* yang mengalami diskriminasi dari pemerintah Tiongkok dan bagaimana kesesuaian Muhammadiyah sebagai Gerakan keagamaan di Indonesia untuk melakukan *faith-based diplomacy* dan syarat-syarat dalam melakukan *faith-based diplomacy*, lalu dijelaskan pula mengenai terpenuhinya Muhammadiyah dalam syarat-syarat untuk melakukan *faith-based diplomacy*.

Melihat situasi kondisi etnis *Uyghur* yang mengalami diskriminasi dari pemerintah Tiongkok, akan dijelaskan bahwa kondisi tersebut tepat untuk melakukan *faith-based diplomacy*. Sebab berkaitan dengan kelompok religiusitas yang menjunjung tinggi identitas. Kemudian dalam pelaksanaan *faith-based diplomacy*, terdapat beberapa syarat yaitu adanya nilai-nilai agama sebagai prinsip untuk mendamaikan, dilakukan oleh aktor keagamaan baik individu maupun institusi, memiliki sifat pluralisme, melakukan pendekatan resolusi konflik, adanya motivasi yang mendalam terhadap perintah agama yang dimiliki oleh diplomat (Johnston, 2003).

#### **2.1 Diskriminasi Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis *Uyghur***

Etnis *Uyghur* adalah suku minoritas terbesar yang resmi diakui oleh Tiongkok, tersebar umumnya di kawasan Asia Tengah dan Barat. Agama Islam

lebih spesifiknya Islam Sunni tradisional moderat menjadi agama yang dianut oleh kelompok etnis *Uyghur*. Komponen ini bahkan teresap dalam kultur *Uyghur*, ditunjukkan dalam sejumlah cerita rakyat dan tradisi penduduk pedesaan yang tinggal di daerah oasis tersebut (Human Rights Watch Report, 2005). Di Tiongkok, domisili etnis *Uyghur* terpusat di daerah otonomi Xinjiang (XUAR). Kebudayaan Mongol-Turki cukup mendominasi di wilayah ini sejak abad ke-IX. Lantas, tidak mengherankan apabila penduduknya merupakan hasil campuran dari bangsa-bangsa tersebut dengan Tiongkok.

Seiring dengan berjalannya waktu, populasi *Uyghur* yang cukup dominan di daerah XUAR mulai terkikis oleh kehadiran populasi Han Tiongkok sebagai akibat dari maraknya imigrasi ke wilayah tersebut (Congressional Research Service Report, 2020). Gesekan kultural ini pun lambat laun berevolusi menjadi sentimen penentuan nasib sendiri. Hal ini termanifestasi pada dekade 30-an dan 40-an, ketika etnis *Uyghur* dan beberapa kelompok etnis muslim setempat mendirikan Republics of Eastern Turkestan di Kashgar (1933) dan Ili (1944) sebagai bentuk resistensi terhadap pemerintahan Tiongkok. Meski kedua republik itu berumur pendek, peristiwa tersebut terus menginspirasi berbagai oposisi nasionalis sejak 1949, khususnya di kalangan *Uyghur*.

Selama empat dekade berikutnya, kontrol yang kuat dari otoritas Partai Komunis di Xinjiang telah meminimalisir segala potensi separatisme etnis di daerah ini. Namun bagi kebanyakan etnis *Uyghur*, harapan dan sentimen untuk memiliki negara sendiri tidak sepenuhnya pudar (Chung, 2002). Memasuki era yang lebih kontemporer, Kerusuhan Urumqi tahun 2009 merupakan peristiwa besar yang melibatkan etnis *Uyghur* dan etnis Han Tiongkok. Kericuhan tersebut

bermula dari (tuduhan) pemerkosaan oleh pemuda *Uyghur* terhadap perempuan Han. Alhasil, banyak korban meninggal dan luka-luka dari kedua belah pihak (Clarke, 2010). Kerusuhan ini sejatinya merupakan puncak dari diskriminasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok. Masalah imigrasi etnis Han Tiongkok yang turut dipromosikan negara menimbulkan berbagai macam masalah kesejahteraan terhadap etnis *Uyghur*. Disparitas tercipta antara kedua kelompok tersebut, dengan posisi berat sebelah ke arah etnis Han Tiongkok. Hal ini seakan-akan menjadikan minoritas *Uyghur* sebagai masyarakat kelas dua (Furtun 2010; Felicia 2013).

Secara historis, konflik antara etnis *Uyghur* dan Tiongkok telah berlangsung lama. Wilayah yang kini dikenal sebagai Xinjiang dahulu merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Ottoman dengan nama East Turkestan di Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan Tiongkok (Felicia, 2013). Namun seiring dengan terjadinya perubahan konstelasi kekuasaan, berbagai pihak mengklaim sebagai pemilik yang sah dari kawasan tersebut. Etnis *Uyghur*, sebagai penduduk asli dari East Turkestan, menjustifikasikan klaim atas dasar sejarah, bahasa, dan kultur. Namun, pihak Tiongkok tidak mengakui hal tersebut. Pada 1884, Tiongkok mendeklarasikan East Turkestan sebagai bagian dari provinsinya dan mengubah nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang, di artikan secara literal sebagai “perbatasan baru”. Semenjak itu, kerusuhan kerap kali terjadi. Pasca-Perang Dunia II, masyarakat *Uyghur* sempat merebut kembali kontrol atas wilayah tersebut. Namun, keberhasilan ini tidak berhasil lama seiring dengan masuknya *Peoples Liberation Army* (PLA) ke wilayah tersebut dan merestorasi kembali kendali di bawah Tiongkok (Furtun, 2010).

Isu separatisme, identitas, agama, dan budaya, yang digaungkan antara etnis *Uyghur* dan Tiongkok lantas memunculkan ketimpangan ekonomi (Maizland, 2019). *Human Rights Organizations* telah mengamati bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya ekstraksi dan pembangunan sering kali dinikmati secara tidak proporsional; dengan bobot paling besar dirasakan oleh etnis Han Tiongkok. Hal ini menyebabkan etnis *Uyghur* semakin terpinggirkan (Maizland, 2019). Tidak hanya itu, banyak warga *Uyghur* mengeluh tentang diskriminasi ras dan diskriminasi etnis minoritas yang kerap kali terjadi, mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan (Amnesty International, 1999).

Segala prosekusi dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok ini tidak sepenuhnya didasari atas faktor ideologis dan identitas, maupun keamanan saja. Terdapat pula motif yang lebih pragmatis di dalamnya. Xinjiang merupakan rumah bagi cadangan batu bara dan gas alam terbesar di Tiongkok. Dengan demikian, penghapusan segala potensi separatisme akan membuat pengembangan wilayah Xinjiang menjadi lebih optimal. Semenjak tahun 1954, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, Tiongkok mendirikan *Xinjiang Production and Construction Corps* (XPCC). Instansi ini unik dan memiliki status khusus yang mana XPCC dikelola secara independen dari pemerintah daerah Xinjiang, memiliki pasukan polisi, pengadilan dan penjara, perusahaan pertanian, kompleks industri, serta jaringan kamp kerja tersendiri. XPCC bahkan memiliki wewenang untuk mengambil wilayah manapun di Xinjiang, termasuk daerah selatan yang dianggap sebagai jantung budaya, dan

tempat tinggal komunitas orang *Uyghur*, untuk kepentingannya (Amnesty International, 1999).

Beberapa pokok permasalahan yang menjadi penyebab diskriminasi terhadap etnis *Uyghur* yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok diantara lain:

### 1. Struktural

Faktor ini lebih menekankan pada fakta akan perubahan pola demografis, dimana terjadi migrasi besar-besaran oleh etnis Han ke dua wilayah utama dimana kaum muslim *Uyghur* mayoritas bertempat tinggal yaitu Xinjiang dan Urumqi. Dampak jangka panjang dari migrasi suku Han adalah gesekan sosial. Akses masyarakat *Uyghur* ke air bersih dan tanah kian terbatas. Kesenjangan ekonomi meningkat akibat praktik perekrutan pekerja yang diskriminatif. Etnis Han makin kaya, sedangkan orang *Uyghur* kian miskin di tanah leluhurnya sendiri (Maizland, 2019).

Faktor struktural mengenai masalah keamanan dalam negeri Tiongkok. Dikarenakan masih adanya kelompok yang menginginkan berdirinya Republik Turkistan Timur, maka Tiongkok harus terus berusaha untuk menjaga keutuhan dan keamanan Provinsi Xinjiang. Apabila hal tersebut tidak dijaga dengan baik oleh Tiongkok maka akan menimbulkan munculnya gerakan-gerakan nasionalis lain dari negara yang masih berkonflik dengan Tiongkok seperti Tibet, Mongolia dan Taiwan. Tiongkok merupakan salah satu negara didunia yang tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk yang padat, dimana Tiongkok memiliki penduduk hampir mencapai 1 milyar jiwa, dan terdiri dari beberapa etnis.

Etnis Han merupakan etnis mayoritas di Tiongkok tercatat sebesar 91,54% penduduk Tiongkok, sementara sisanya sebesar 8,41% merupakan kelompok etnis minoritas. Diantara kaum minoritas itu terdapat pemeluk islam sekitar 21 juta jiwa yang terdiri dari suku Hui, *Uyghur*, Kazakh (Hasake), Tatar, Kirgis, Tajik, Ozbek, Dongxiang, Salar, dan Bonan. Namun minoritas etnis Hui dan *Uyghur* yang paling dominan (Harahap, 2021).

## 2. Politik

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki peradaban tertua di dunia sehingga membuat Tiongkok memiliki catatan sejarah yang panjang dan dinamika politik yang beragam. Kepentingan utama dari Tiongkok adalah kedaulatan. Ideologi komunis serta nasionalitas atas nama etnis Han yang semakin diintensifikan kepada seluruh etnis-etnis lainnya yang ada di dataran Tiongkok.

Dengan begitu bahwa Tiongkok tidak akan pernah membiarkan satu wilayahnya untuk lepas dari Tiongkok, hal ini juga berlaku bagi Provinsi Xinjiang. Memanasnya hubungan antara Suku *Uyghur* dengan Pemerintah Tiongkok juga disebabkan dengan adanya gerakan-gerakan nasionalis yang menginginkan kemerdekaan Republik Turksitan Timur di Xinjiang. Kelompok ini menunjukkan eksistensi kegiatan mereka, sehingga membuat Tiongkok tidak bisa membiarkan kelompok ini semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang lebih besar. Diskriminasi yang dialami oleh kaum muslim *Uyghur* adalah merupakan kebijakan Pemerintah Tiongkok yang menginginkan terwujudnya *One Tiongkok Policy* atau kebijakan satu Tiongkok (Maizland, 2019).

Pola-pola intergratif Pemerintah Tiongkok dengan melakukan *civic education* terbukti tidak berhasil mengintegrasikan kaum muslim *Uyghur* dengan penduduk Tiongkok mayoritas lainnya. Bahkan justru kaum muslim *Uyghur* melakukan perlawanan karena kebijakan migrasi Pemerintah Tiongkok dengan melakukan perpindahan secara besar-besaran etnis Han yang merupakan etnis mayoritas ke daerah Xinjiang dan Urumqi, migrasi besar-besaran ini tidak lain adalah bentuk kebijakan Pemerintah Tiongkok untuk melakukan *ethnic cleansing* (pembersihan etnis) untuk menyingkirkan kaum muslim *Uyghur* secara perlahan dari wilayah Xinjiang dan Urumqi, selain itu juga kebijakan keluarga berencana di Tiongkok menguntungkan suku Han, yang memiliki tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi dibanding suku lainnya (Maizland, 2019).

### 3. **Ekonomi**

Semenjak Pemerintahan Tiongkok memutuskan untuk melakukan migrasi besar-besaran terhadap suku Han ke Provinsi Xinjiang membuat suku *Uyghur* merasakan persaingan yang ketat di Provinsi Xinjiang. Karena Suku *Uyghur* kalah bersaing di dalam penerimaan lapangan pekerjaan menimbulkan kesenjangan ekonomi diantara Suku *Uyghur* dan Suku Han. Dari kesenjangan sosial ini memicu pertentangan diantara kedua suku.

Ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh kesulitan warga yang beretnis muslim *Uyghur* untuk mencari pekerjaan. Sekalipun mereka memiliki daya saing serta kualitas yang memadai, namun Pemerintah Tiongkok termasuk lembaga-lembaga di negaranya mempersulit masyarakat kaum muslim *Uyghur* untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak sehingga

dapat mengangkat perekonomian keluarga mereka, terlebih lagi upaya pembangunan semakin mempersulit kaum muslim *Uyghur* untuk dapat mengangkat harkat dan martabat mereka melalui peningkatan perekonomian (Maizland, 2019).

#### 4. Budaya

Secara historis, masyarakat *Uyghur* merasa bahwa mereka memiliki perbedaan identitas dengan Tiongkok. Suku *Uyghur* banyak dipengaruhi oleh budaya dari Asia Tengah seperti Kazakhstan, Tajikistan, Kirghiztan, Pakistan, Turki. Mereka juga berkeyakinan bahwa suku *Uyghur* di Provinsi Xinjiang adalah keturunan Turki sehingga membuat mereka selalu berusaha untuk memerdekakan diri dan memisahkan diri dari Pemerintahan Tiongkok. Akibat dari perbedaan budaya yang dirasakan oleh suku *Uyghur* menimbulkan kekhawatiran dalam diri suku *Uyghur* akan hilangnya identitas budaya mereka. Karena kekhawatiran mereka itulah semakin mengeraskan sikap *Uyghur* untuk menolak sejalan dengan Tiongkok. Hingga sekarang diantara Pemerintahan Tiongkok dan suku *Uyghur* masih sulit untuk hidup berdampingan secara damai sehingga masih sering terjadi gesekan-gesekan (Maizland, 2019).

Diskriminasi budaya yang semakin parah, misalnya dapat dipicu dari penyebaran penghinaan etnis serta propaganda yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap kaum muslim *Uyghur* yang kemudian mengadu domba etnis Han, yang melampiaskan kemarahannya akibat terhasut isu yang tidak benar tersebut atau propaganda yang sengaja diciptakan. Salah satu tuduhan atau propaganda yang dilancarkan oleh



Pemerintah Tiongkok ialah bahwa etnis muslim *Uyghur* merupakan kelompok teroris dan separatis (Maizland, 2019).

## **2.2 Gerakan Muhammadiyah sebagai Organisasi Perdamaian Dunia**

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen (Salam, 2009). Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan tahayul, Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas. Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya.

Muhammadiyah berkiprah ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak semacam berbagai ragam lembaga pendidikan dari sejak Taman Kanak-kanak, hingga Perguruan Tinggi, membangun sekian banyak Rumah Sakit, Panti Asuhan, dan sebagainya. Seluruh amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan yang tunggal, yaitu dijadikan sarana dan wahana dakwah islam sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-sunnah.

Menurut David A. Locher (2000) terdapat tiga hal yang membedakan gerakan sosial (*social movement*) dari bentuk perilaku kolektif lainnya, yaitu: (1) *Organized*, bahwa gerakan sosial itu terorganisasi, sedangkan kebanyakan perilaku kolektif tidak terorganisasi baik pemimpin, pengikut, maupun proses pergerakannya; (2) *Delibrate*, gerakan sosial itu direncanakan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan; (3) *Enduring*, gerakan sosial itu keberadaannya untuk jangka waktu yang panjang hingga beberapa dekade. Artinya sebuah gerakan sosial, terlebih gerakan keagamaan memiliki karakter yang kuat untuk bergerak secara terorganisir, terencana dan berkelanjutan sehingga tidak mudah tergantik oleh pergeseran politik. Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial-keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam.

Muhammadiyah memosisikan diri sebagai organisasi keagamaan dengan misi dakwah Islam *amar makruf nahi munkar*. Untuk menguatkan posisi itu, maka dirumuskan Lima Pilar Muhammadiyah, yaitu: 1) Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi aqidah Islam, 2) Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, 3) Muhammadiyah sebagai gerakan mobilisasi amal shaleh, 4) Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan (*al-Tarbiyah*), 5) Muhammadiyah sebagai gerakan non-politik praktis (Farihen *et.al.*, 2018).

Ungkapan keagamaan ini mungkin berbeda dengan cara beragama tradisional, tetapi memiliki motivasi yang lebih kuat dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan. UNESCO menyatakan bahwa “*organisasi keagamaan sebagai mitra kunci potensial lokal, nasional dan internasional dalam beberapa dekade*”. Sistem kepercayaan dan agama memberikan perhatian kepada orang lain untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Hal ini berkaitan

dengan di mana pendidikan agama dapat diintegrasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Banyak dari organisasi keagamaan yang berhasil menyelenggarakan pendidikan agama yang terintegrasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan seperti melestarikan alam dan lingkungan serta langkah-langkah untuk memulihkan alam sebagai tempat tinggal umat manusia dan hal-hal lain yang dibutuhkan dan juga membantu masyarakat rentan lainnya.

Prasyarat proses internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah terdiri dari tiga domain berikut (Baidhawiy, 2015): Pertama, menggunakan ruang publik. Muhammadiyah memiliki website dan majalah berkala, dan akses ke ruang publik yang luas melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan aksesnya ke proses politik Indonesia; Kedua, Muhammadiyah berhasil membentuk ketahanan masyarakat melalui berbagai inisiatif advokasi sosial hingga program filantropi yang kuat; Ketiga, ranah kehidupan keagamaan transformatif yang menekankan pada proses aktualisasi spiritual melalui peran sosial.

Berdasarkan teori *faith-based diplomacy* dalam mengupayakan perdamaian menurut Johnston (2003), ada empat poin penting yang dimiliki pihak Muhammadiyah, diantaranya:

1. Dalam komunitas internal, Muhammadiyah memiliki pengaruh yang besar.
2. Muhammadiyah memiliki status reputasi yang baik dalam kekuatan nonpolitis.
3. Muhammadiyah mampu menjadi mediator dan membangun rekonsiliasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik.

4. Muhammadiyah mampu menggerakkan masyarakat tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung upaya perdamaian yang dilakukan.

### **2.3 Dukungan Pemerintah dan Upaya yang dilakukan Muhammadiyah terhadap Diskriminasi Etnis *Uyghur***

Berkenaan dengan isu *Uyghur* di Xinjiang, Menteri Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD menyebutkan telah bermediasi dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia yaitu Xiao Qian. Xiao menyebutkan bahwa kasus etnis *Uyghur* tersebut ialah kasus separatis karena mereka (*Uyghur*) memiliki agenda di luar kerangka negara Tiongkok. Adapun berdasarkan ungkapan Xiao Qian tersebut, maka Mahfud MD pun menjelaskan sebagai berikut:

*“Dia menjelaskan di China itu kan banyak sekali orang Islam, di berbagai penjuru, ndak apa-apa. Kecuali Uyghur katanya. Kenapa Uyghur? Itu mempunyai agenda sendiri di luar kerangka negara, separatislah kalau istilahnya.”* (CNNIndonesia, 2020).

Adapun pada pertemuan tersebut selain untuk kepentingan diplomasi, Mahfud menyebutkan memang sengaja dilaksanakan untuk membahas tentang isu *Uyghur* tersebut. Lebih lanjut, Mahfud juga turut meminta seluruh pihak untuk mempercayakan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi untuk mengatasi polemik *Uyghur* ini. Sebab, sejauh ini Mahfud mengatakan bahwa Kemenlu telah mengedepankan diplomasi lunak terkait hal tersebut. Mahfud juga menambahkan sebagai berikut:

*“Diplomasi kita itu diplomasi lunak aja. Kita tidak ikut mencampuri, kita melihatnya secara objektif.”* (CNNIndonesia, 2020).

Berdasarkan hal ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah secara terang-terangan menyebutkan bahwa gaya diplomasi yang tepat yang harus dipakai

Indonesia ketika berhadapan dengan Tiongkok ialah diplomasi lunak. Hal tersebut mengingat bahwa selain Indonesia tidak memiliki kuasa terhadap hal-hal otoritatif yang terjadi dalam kawasan Tiongkok, Indonesia terhadap Tiongkok juga masih belum memiliki nilai yang seimbang untuk berada *power* yang kuat.

Di sisi yang bersamaan, Duta Besar Tiongkok untuk RI Xiao Qian juga masih berada pada posisi yang sama, yaitu ia mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi suku *Uyghur* di Xinjiang jika masih penasaran, sebab di sana tidak terdapat persekusi apalagi genosida seperti yang diberitakan. Xiao Qian turut menyampaikan hal itu ketika ia bertemu Kepala Staf Kepresidenan pada 17 Desember 2019 di Jakarta (Idhom, 2019).

Lebih lanjut, Xiao juga menyebutkan bahwa ada persoalan di Xinjiang yang sedang ditangani oleh pemerintah Tiongkok, persoalan ini sama dengan kondisi di dunia lain, yakni mereka tengah memerangi kasus radikalisme dan terorisme. Sementara itu, Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi persoalan *Uyghur* ini sebagai urusan internal Tiongkok. Moeldoko juga menambahkan, bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seringkali pemerintah di sejumlah negara memang kerap menghadapi masalah hoaks. Berkenaan dengan data yang didapatkan di atas, dapat dijelaskan dan dipahami bahwa isu pemanggilan Duta Besar Tiongkok Xiao Qian oleh pemerintah RI beberapa tempo lalu tersebut menunjukkan sikap pemerintah Indonesia yang sudah tampak peduli terhadap kasus kemanusiaan yang menimpa suku *Uyghur* di provinsi Xinjiang, Tiongkok (Idhom, 2019). Meski begitu, Indonesia belum memiliki nilai lebih untuk mampu melaksanakan tindakan diplomasi yang lebih

tinggi selain berdiplomasi lunak dengan Tiongkok. Hal ini sekali lagi disinyalir turut menyimpan kepentingan lain antara kedua negara, mengingat substansi poin sebelumnya yaitu pinjaman luar negeri, meningkatnya nilai perdagangan, serta investasi, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bukti bahwa Tiongkok dan Indonesia bersama-sama berupaya merawat identitas persahabatannya, bahkan ingin memperluas kedekatan keduanya lagi sebagai saudara melalui perluasan di berbagai bidang Kerjasama (Idhom, 2019).

Berdasarkan hubungan diplomasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah. Setelah kunjungan tersebut, perwakilan MUI memberikan pernyataan bahwa dalam kunjungan tersebut, delegasi dari Indonesia telah mempelajari aktifitas yang ada di Xinjiang termasuk aktifitas dalam kamp pelatihan. Kunjungan tersebut kemudian menghadirkan kesimpulan bahwa Tiongkok telah memisahkan urusan agama dengan pemerintahan, dimana pemerintah Tiongkok tidak memaksakan warganya untuk beragama maupun tidak. Selain itu Tiongkok juga memiliki trauma atas kejadian terorisme dimasa lampau yang menjadikan Tiongkok mengeluarkan kebijakan-kebijakan ketat terkait terorisme dan separatisme. Menurut penuturan perwakilan delegasi dari MUI, Muhyiddin Junaidi, kebijakan Tiongkok sangat mudah disalah artikan sehingga sebagai umat Muslim harus berusaha mengutamakan kehati-hatian.

Dalam masyarakat Tiongkok, ibadah atau agama adalah suatu urusan pribadi yang tidak boleh ditunjukkan di depan umum. Jika diperlihatkan di depan umum, maka hal tersebut akan dianggap sebagai tindakan radikal. Hal tersebut

berpotensi menjadikan seorang muslim mendapat sanksi karena dianggap radikal. MUI, NU serta Muhammadiyah kemudian memiliki pandangan yang sama bahwa perlu adanya keterlibatan dari Tiongkok *Islamic Association* (CIA) dalam pemberian status radikal. Keterlibatan CIA diharapkan dapat membantu umat Islam di Tiongkok untuk dapat melaksanakan ibadah secara lebih leluasa (Ramadhani, 2019). Meskipun Muhammadiyah menyatakan satu pemikiran dengan MUI dan NU, namun dalam pernyataannya, Muhammadiyah mengemukakan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan ketika berkunjung ke Xinjiang (Rahayu, 2019).

Keterlibatan Muhammadiyah dalam aktivitas kemanusiaan sudah dimulai sejak awal pendiriannya. Peran Muhammadiyah dalam aktivitas kemanusiaan telah meningkat setiap tahunnya. Dalam konteks kebencanaan, Muhammadiyah banyak memberikan bantuan kemanusiaan berupa medis, seperti halnya pendirian rumah sakit serta relawan medis di daerah bencana. Selain medis juga aspek psikososial yang mana kerja relawan psikososial ini adalah mendampingi mental para korban agar tetap tenang dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus bunuh diri yang dilakukan pengungsi yang stress (Akbar, 2012). Keterlibatan Muhammadiyah dalam isu kemanusiaan tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga di luar batas negara. Selama berkecimpung di dalam isu kemanusiaan, Muhammadiyah melalui MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) juga pernah terlibat langsung dalam pemberian bantuan medis serta memobilisasi dan mengkoordinasi bantuan pemerintah Indonesia kepada korban bencana di Nepal pada tahun 2015.



Muhammadiyah melalui MDMC juga berperan dalam korban bencana terkait topan Haiyan yang terjadi di Filipina (Suara Muhammadiyah, 2018).

Menanggapi isu diskriminasi etnis *Uyghur* di Xinjiang, Muhammadiyah sebagai Gerakan Keagamaan di Indonesia bersana Nahdhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia melakukan pertemuan dengan Kedubes Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian pada 28 Desember 2018.

**Gambar 1. Pertemuan Kedubes Tiongkok untuk RI dengan Muhammadiyah**



Sumber: <https://merdeka.com/i/w/news/2018/12/28/1034985/670x335/bertemu-dubes-china-muhammadiyah-bahas-diskriminasi-muslim-uyghur>.

Muhammadiyah sejak awal sudah mendesak pemerintah untuk aktif menangani dugaan diskriminasi HAM yang menimpa etnis *Uyghur* yang mayoritas muslim. Terlebih, saat diundang Kedubes Tiongkok ke Xinjiang, Muhammadiyah menemukan berbagai kejanggalan. Sebagai gambaran, saat ini dunia tengah fokus pada kebijakan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang diduga melanggar HAM karena mendiskriminasi etnis *Uyghur*. Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan media arus utama dunia menunjukkan lebih dari satu juta Muslim *Uyghur* ditahan di "kamp-kamp re-edukasi" yang membatasi pergerakan mereka. Mereka diduga telah dipaksa meninggalkan



Islam, dilarang beribadah, dan dipaksa memeluk komunisme. Tiongkok telah berulang kali membantah tuduhan itu. Mereka mengatakan kamp itu dibangun untuk menangkal radikalisme, terorisme, dan gerakan separatisme yang menargetkan Xinjiang.

Berdasarkan isu terkait diskriminasi etnis *Uyghur* di Tiongkok tersebut, dibentuklah perwakilan dari Gerakan Keagamaan diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama yang melakukan kunjungan ke Wilayah Otonomi Xinjiang- *Uyghur* (XUAR), rumah bagi etnis minoritas *Uyghur* di Xinjiang, dengan populasi muslim yang signifikan. Kunjungan itu berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 24 Februari 2019.

**Gambar 2. Kunjungan Perwakilan RI ke Xinjiang**



Sumber: <https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/02/28>.

Menyusul maraknya pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim *Uyghur* dan bagaimana masyarakat di Indonesia bereaksi atas kabar tersebut. Salah satu poinnya adalah mereka meminta pemerintah Tiongkok untuk memberikan kebebasan beragama kepada warganya. Selama di Tiongkok, delegasi Indonesia diberi kesempatan untuk

melakukan serangkaian pertemuan dengan para tokoh ulama, tokoh masyarakat, serta kunjungan ke Xinjiang Islamic Institute beserta beberapa masjid. Delegasi juga sempat mengunjungi balai latihan vokasi (*Re-education Center*) yang ada di Xinjiang.

Delegasi tersebut melihat sikap pemerintah Tiongkok tak terlepas dari trauma dengan peristiwa teror yang terjadi di Negeri Tirai Bambu tersebut. Balai latihan tersebut berisi pria dan wanita yang disinyalir terpapar radikalisme. Secara garis besar dipahami bahwa konstitusi Tiongkok itu sangat mudah disalah tafsirkan. Jadi umat Islam itu tidak boleh menerapkan agamanya dengan baik di ruang publik. Maka tidak diperkenankan pakai jilbab atau salat di ruang publik. Kalau ketahuan, dimasukkan ke kelompok radikal. lalu dimasukkan ke dalam kamp re-edukasi itu, dan dianggap tidak nasionalis. Fakta yang didapat di sana, para peserta kamp re-edukasi memang tidak bisa beribadah secara bebas di ruang publik termasuk di balai latihan tersebut. Kondisi tersebut tentu saja membuat umat muslim *Uyghur* serba terbatas dalam beribadah.

Hasil dari kunjungan tersebut, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi yaitu, kearifan untuk memahami sikap Pemerintah Tiongkok yang melakukan Diskriminasi terhadap etnis *Uyghur* di Xinjiang. Jika dibandingkan dengan konstitusi di Indonesia, situasi kebebasan beragama sangat kontras. Pendekatan persuasif agar pemerintah Tiongkok bisa memberikan ruang beribadah yang lebih baik bagi muslim yang ada di sana, dan lembaga keagamaan juga harus dilibatkan dalam memberikan tafsir '*radikal*'. Sebagai tindak lanjut atas kunjungan tersebut, delegasi akan menyampaikan hasil

kunjungan ke pemerintah. Hingga kemudian catatan dan harapan bisa disampaikan ke otoritas Tiongkok.

Dalam hal isu pelanggaran HAM yang terjadi di Tiongkok, Tokoh Muhammadiyah yang sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsudin melakukan pengecaman keras terhadap penindasan yang dilakukan Tiongkok terhadap muslim *Uyghur*. Menurutnya, Penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Din Syamsudin yang juga merupakan *President of Asian Conference on Religions for Peace* (ACRP) meminta agar penindasan yang dilakukan terhadap muslim *Uyghur* segera dihentikan. Selain itu dia juga mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan masyarakat Internasional untuk bersikap tegas dan menyelamatkan nasib muslim *Uyghur* dari rezim pemerintahan Tiongkok (detik.com).

Selain itu, sebagai wujud tindakan Muhammadiyah terhadap umat Muslim *Uyghur*, pada Februari 2019 Muhammadiyah bersama beberapa perwakilan Gerakan Keagamaan Islam telah melakukan kunjungan ke Xinjiang guna mendapatkan informasi yang akurat. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, KH Muhyiddin Junaidi menegaskan, perwakilan ormas Islam tidak ada yang setuju dengan kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap Muslim *Uyghur* di Xinjiang. KH Muhyiddin menjelaskan, konstitusi Tiongkok memang mengatakan agama hanya bisa diterapkan di tempat tertutup, sehingga Muslim *Uyghur* tidak bisa melaksanakan ibadah di tempat umum atau di tempat pelatihan kerja yang dibuat pemerintah Tiongkok. Selanjutnya, perwakilan Gerakan Keagamaan Islam yang ke Xinjiang telah sepakat meminta

pemerintah Tiongkok agar memberikan izin beribadah kepada umat Islam. Bukan hanya umat Islam yang ada di *Uyghur* tapi juga yang ada di wilayah lain.

Muhammadiyah sebagai Gerakan keagamaan di ranah kemanusiaan dan moral yang merepresentasikan sebagai kekuatan Islam tak tinggal diam terkait masalah ini. Suara yang mereka keluarkan bukan hanya berkaitan dengan agama, ras, etnik, maupun suku bangsa tetapi juga asas kemanusiaan. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya telah memberi masukan pada pemerintah Indonesia mengenai permasalahan itu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memprotes pemberitaan media Amerika Serikat “*Wallstreet Journal*” yang menuding adanya fasilitas dan lobi-lobi pemerintah Tiongkok terhadap sejumlah ormas Islam Indonesia terkait permasalahan HAM muslim *Uyghur* di Tiongkok. Muhammadiyah menilai pemberitaan itu tak berdasar dan memfitnah mereka dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berikut ini pernyataan resmi terkait pandangan Muhammadiyah mengenai isu pelanggaran HAM di *Uyghur*:

1.3 Menyesalkan pemberitaan *Wallstreet Journal* yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Tiongkok terhadap PP. Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU, dan MUI atas permasalahan HAM di Tiongkok. Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar *Wallstreet Journal* meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila

hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya.

2.3 Mendesak kepada Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan Masyarakat *Uyghur*. Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat *Uyghur* atas dalih apapun. Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah *Uyghur* dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh *Uyghur* dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas.

3. Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM atas Masyarakat *Uyghur*, Rohingnya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.

4. Mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang.

5. Mendesak Pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif. Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya.

6. Menghimbau umat Islam agar menyikapi masalah pelanggaran HAM di Xinjiang dengan penuh kearifan, rasional, damai, dan tetap memelihara ukhuwah islamiyah dan persatuan bangsa. Hendaknya tidak ada pihak-pihak yang sengaja menjadikan masalah *Uyghur* sebagai komoditas politik kelompok dan partai tertentu serta mengadu domba masyarakat dengan menyebarkan berita yang menyesatkan dan memecah belah umat dan bangsa melalui media sosial, media massa, dan berbagai bentuk provokasi lainnya.
7. Menghimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk konsisten menyikapi persoalan dengan cerdas, berpegang teguh pada *khittah* dan kepribadian Muhammadiyah, tidak terpengaruh berita media sosial yang menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.  
(<https://nasional.tempo.co/read/1284582/tujuh-poin-pernyataan-sikap-muhammadiyah-terkait-isu-uyghur>).

### **BAB III**

#### **PERAN MUHAMMADIYAH TERHADAP DISKRIMINASI ETNIS *UYGHUR* MENGGUNAKAN *FAITH-BASED DIPLOMACY***

Dalam menganalisis upaya-upaya Muhammadiyah menanggapi diskriminasi etnis *Uyghur* di Tiongkok, penulis akan menggunakan teori *faith-based diplomacy* dari Douglas Johnston. Dalam penelitian ini, teori *faith-based diplomacy* yang digunakan memiliki empat bentuk dalam upaya melakukan perdamaian diantaranya: 1) *Offering a new vision*; 2) *Building bridge*; 3) *Mediation* dan 4) *Healing the wound of history*. Berdasarkan bentuk dalam upaya melakukan perdamaian tersebut, penulis menganalisis bentuk *offering a new vision* dan

*building bridge* yang dilakukan Muhammadiyah dalam menanggapi isu diskriminasi etnis *Uyghur* di Tiongkok.

Sejauh ini Muhammadiyah hanya melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk melihat secara langsung apa yang terjadi terhadap etnis *Uyghur*. Kerjasama hanya dilakukan Muhammadiyah dengan pemerintah Tiongkok, sedangkan kerjasama dengan pihak *Uyghur* belum bisa dilakukan melihat akses yang sulit didapatkan.

### **3.1 *Offering a New Vision* yang dilakukan Muhammadiyah terhadap Diskriminasi Etnis *Uyghur***

Pelaksanaan *faith-based diplomacy* yang mewajibkan adanya nilai-nilai agama sebagai prinsip untuk mendamaikan dan dilakukan oleh aktor keagamaan baik individu maupun institusi, Muhammadiyah meyakini bahwa untuk mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan perlu dilakukan dakwah *fi sabilillah*. Kegiatan dakwah merupakan tanggung jawab setiap muslim yang dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan kehidupan. Dakwah Muhammadiyah dilakukan dengan semangat *amar ma'ruf nahi mungkar* dan diwujudkan atas sikap hikmah (kebijaksanaan), *mauidzah hasanah* (peringatan yang baik), dan semangat musyawarah atas dasar takwa.

Proses dakwah Muhammadiyah dibangun atas strategi *basyiran* (kabar gembira) dan *tandzir* (peringan) bagi umat Islam, dan strategi ajakan dan kabar gembira bagi umat yang belum Islam. Kegiatan dakwah Muhammadiyah juga dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik itu lisan, tulisan, maupun kegiatan nyata (*bil hal*). Semua kegiatan kehidupan manusia diikhtiarkan untuk kebahagiaan hidup sesungguhnya merupakan bagian dari kegiatanm dakwah,



sehingga kegiatan dakwah Muhammadiyah senantiasa diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas diri dan membebaskan umat manusia dari cara pandang dan cara hidup yang tertutup (*jumud*) dan kesyirikan. Dakwah Muhammadiyah adalah yang berupaya untuk memberikan pencerahan dan cara pandang hidup yang modern dan berkemajuan berdasar al-Qur'an dan as-Sunnah, serta aturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku.

Dalam situasi spesifik *faith-based diplomacy* bahwa konflik yang terjadi di garis patahan antara budaya dan peradaban, ada sejumlah skenario di mana diplomasi berbasis agama dapat bekerja dengan arah yang berlawanan. Kemungkinan pertama adalah konflik di mana agama merupakan faktor penting dalam identitas salah satu atau kedua komunitas. Perselisihan yang telah bertahan selama lebih dari empat dekade diantara etnis *Uyghur* dan Pemerintah Tiongkok adalah perwakilan dari kemungkinan tersebut. Secara historis, konflik antara etnis *Uyghur* dan Tiongkok telah berlangsung lama. Wilayah yang kini dikenal sebagai Xinjiang dahulu merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Ottoman dengan nama *East Turkestan* di Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan Tiongkok (Felicia, 2013). Namun seiring dengan terjadinya perubahan konstelasi kekuasaan, berbagai pihak mengklaim sebagai pemilik yang sah dari kawasan tersebut.

Etnis *Uyghur* yang merupakan pemeluk agama Islam, sebagai penduduk asli dari *East Turkestan*, menjustifikasikan klaim atas dasar sejarah, bahasa, dan kultur. Namun, pihak Tiongkok tidak mengakui hal tersebut. Pada 1884, Tiongkok mendeklarasikan *East Turkestan* sebagai bagian dari provinsinya dan



mengubah nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang, di artikan secara literal sebagai “perbatasan baru”.

Skenario kedua di mana diplomasi berbasis agama dapat bekerja adalah situasi konflik di mana para pemimpin agama dapat dimobilisasi untuk memfasilitasi perdamaian. Resolusi yang diusung oleh Muhammadiyah sebagai Gerakan keagamaan dikenal dengan Gerakan *tajdid* Muhammadiyah. *Tajdid* berasal dari bahasa arab yang berarti pembaharuan. *Tajdid* mempunyai dua arti, dalam bidang akidah dan ibadah, *tajdid* bermakna pemurnian (purifikasi) dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Saw; dan dalam bidang muamalat duniawiah, *tajdid* berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntunan zaman berdasar ajaran Islam.

Hubungan antara Tiongkok dan *Uyghur* pada awalnya memiliki hubungan yang cukup baik namun semenjak terjadinya pemberontakan An Lu-Shan hubungan diantara keduanya diwarnai konflik. Hubungan semakin memanas ketika tahun 1990 hingga 2016, banyak terjadi keributan yaitu mulai pemberontakan senjata, demonstrasi hingga tindakan-tindakan yang mampu mengancam persatuan dan keamanan wilayah. Konflik ini mendapatkan kecaman dari dunia Internasional yakni anggota delegasi PBB dan Amerika. Mereka merasa bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Tiongkok adalah kekerasan kemanusiaan dan penindasan etnis. Alasan yang membuat Tiongkok dikecam adalah mereka merasa bahwa Tiongkok telah melakukan penahanan terhadap 1 juta orang yang kebanyakan dari suku Uighur di kamp pengasingan di Xinjiang.

Muhammadiyah menyarankan pemerintah Tiongkok untuk melakukan pendekatan yang elegan dan berfokus kepada hak asasi manusia agar berpegang pada prinsip supermasi hukum dan pendekatan yang berbasis hukum dalam menangani ekstrimisme, terorisme dan separatisme sebagaimana alasan Pemerintah Tiongkok terhadap perlakuan etnis *Uyghur*. Muhammadiyah juga menawarkan Pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dan menjelaskan dengan sebenar-benarnya terkait keadaan etnis *Uyghur* serta bekerjasama dengan berbagai lembaga resmi yang berwenang menangani permasalahan kemanusiaan untuk mengatasi konflik yang terjadi dan memperkecil opini publik.

Menanggapi hal tersebut Tiongkok berusaha membuktikan bahwa yang dilakukan di Provinsi Xinjiang bukan sebuah kejahatan kemanusiaan melainkan upaya untuk mempertahankan kepentingan nasional dan hegemoninya di wilayah tersebut serta sebagai bentuk upaya dalam melawan gerakan separatisme, terorisme dan ekstrimisme agama. Untuk mengendalikan situasi di Xinjiang pemerintah Tiongkok berusaha melakukan berbagai cara baik ditindak secara hukum hingga pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kerja.

Semenjak didirikannya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja, aktivitas dari gerakan nasionalis seperti terorisme, separatisme dan ekstrimisme agama mengalami penurunan dan keadaan di provinsi Xinjiang mulai stabil. Selain itu, pendirian kamp ini diperlukan untuk menghindari Xinjiang dari segala terror yang mampu mengancam keamanan wilayah dan untuk mencegah ekstremisme agama, terorisme dan separatisme terus berkembang di wilayah ini.

Muhammadiyah juga memberikan himbauan kepada masing-masing pihak yang berkonflik maupun pihak yang mengecam atas konflik tersebut agar tidak mudah termakan isu-isu pemberitaan yang kurang jelas sumbernya dan meminta agar umat Islam di Indonesia menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama Muslim termasuk solidaritas dengan Uighur untuk menciptakan kesatuan dan perdamaian.

Muhammadiyah sepakat dalam menyatakan konflik di *Uyghur* merupakan permasalahan domestik Pemerintah Tiongkok di Xinjiang. Pihak Muhammadiyah hanya mampu menyarankan pemerintah Tiongkok untuk mengikutsertakan Gerakan keagamaan Islam di Tiongkok dalam pengambilan keputusan tindakan-tindakan yang dianggap radikal agar keputusan tersebut tidak mempersempit ruang gerak Muslim di Tiongkok dalam melaksanakan ibadah.

Muhammadiyah banyak mengajak teman-teman dari perguruan tinggi asing untuk berkunjung ke Uhamka Jakarta dan UMM Malang. Kurang lebih 500 program pelatihan CSR perusahaan china yang ada Indonesia. Dan kurang lebih 3.000 S1, S2 dan S3 guru-guru Muhammadiyah disiapkan untuk berpartisipasi

### **3.2 *Building Bridges* yang dilakukan Muhammadiyah terhadap Diskriminasi**

#### ***Etnis Uyghur***

Isu *Uyghur* yang mendapatkan diskriminasi oleh pemerintah Tiongkok sebagai aktor dominan ramai diperbincangkan pada tahun 2018 oleh masyarakat Indonesia, termasuk warga Muhammadiyah. Berbagai media internasional

menampilkan berita-berita terkait kekerasan dan diskriminasi yang diderita oleh etnis *Uyghur*. Berita tersebut menduga ada diskriminasi agama seperti larangan shalat, berpuasa, memelihara jenggot, menggunakan jilbab, sulitnya akses mendapatkan makanan halal dan juga dugaan kekerasan dengan ditahannya sekitar satu juta etnis *Uyghur* di kamp-kamp pelatihan yang disediakan pemerintah Tiongkok serta berbagai dugaan pelanggaran HAM lainnya.

Salah satu bentuk *building bridges* adalah kunjungan Duta besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian ke kantor pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir untuk membahas beberapa isu, salah satunya mengenai etnis *Uyghur*.

Dalam menyikapi isu etnis *Uyghur* tersebut, Muhammadiyah sebagai salah satu Gerakan Keagamaan Islam di Indonesia sekaligus Gerakan perdamaian mengeluarkan pernyataan pada akhir 2018. Pernyataan tersebut berisi 7 poin yang berkesimpulan jika segala pemberitaan terkait persekusi terhadap etnis *Uyghur* benar adanya, maka Muhammadiyah mengecam tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh Tiongkok, kemudian Muhammadiyah meminta pemerintah Tiongkok membuka akses secara terbuka agar masyarakat internasional dapat mengamati keadaan *Uyghur* secara real. Muhammadiyah juga mendesak berbagai lembaga berwenang seperti PBB, OKI serta pemerintah Indonesia agar segera menindak lanjut isu *Uyghur* (PP Muhammadiyah, 2018).

Selanjutnya setelah diajukan saran terkait pembukaan akses menuju Xinjiang, beberapa delegasi Muhammadiyah melakukan kunjungan ke Xinjiang pada Februari 2019. Pada kunjungan ke Xinjiang tersebut, disebutkan bahwa

pemerintah Tiongkok sangat terbuka perihal keagamaan, namun terdapat kesulitan etnis *Uyghur* dalam kamp pelatihan untuk melaksanakan sholat karena dugaan radikalisme. Pada saat di Xinjiang, delegasi Muhammadiyah sempat mengusulkan perizinan sholat dalam 3 waktu di kamp pelatihan terhadap pemerintah Tiongkok tetapi tidak mendapat sambutan yang baik. Selepas itu, delegasi Muhammadiyah mengusulkan agar diikuti sertakannya CIA dalam penentuan tingkat radikalisme di Tiongkok (Suara Muhammadiyah, 2019).

Seusainya kunjungan ke Xinjiang, seluruh delegasi dari Indonesia kemudian menyatakan bahwa permasalahan *Uyghur* di Xinjiang merupakan isu domestik yang sebaiknya segera diselesaikan oleh Tiongkok tanpa adanya kekerasan. Pernyataan tersebut mengundang dugaan dari WSJ yang menuduh adanya sokongan dana dari Tiongkok terhadap Muhammadiyah agar Muhammadiyah tidak lagi menyuarakan hak-hak etnis *Uyghur*. Atas dugaan tersebut Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan kembali pada Desember 2019 yang berisi sanggahan Muhammadiyah kepada tuduhan WSJ dan meminta WSJ meminta maaf atas tuduhannya. Muhammadiyah juga mendesak pemerintah Tiongkok untuk lebih membuka akses menuju Xinjiang dan keadaan etnis *Uyghur* dan menghentikan seluruh pelanggaran HAM atas dasar apapun (PP Muhammadiyah, 2019).

Diketahui bahwa Suara Muhammadiyah merupakan sebuah media yang strukturnya langsung berada di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehingga Suara Muhammadiyah menjadi media resmi yang mengeluarkan pernyataan atau suara resmi dari PP Muhammadiyah, termasuk pernyataan Muhammadiyah terkait *Uyghur*. Pada awalnya Muhammadiyah cukup keras

dalam menanggapi isu etnis *Uyghur*. Kemudian upaya pertama yang ditempuh Muhammadiyah adalah dengan beraudiensi dengan kementerian Tiongkok yang mengurus urusan agama (PP Muhammadiyah, 2018).

Selanjutnya PP Muhammadiyah meminta pemerintah Tiongkok untuk membuka akses terhadap dunia internasional, termasuk keterbukaan informasi dan keterbukaan wilayah agar tidak ada kesalah pahaman di kalangan masyarakat internasional. Setelah saran tersebut, beberapa delegasi Muhammadiyah mengunjungi Tiongkok.

Delegasi Muhammadiyah mengunjungi beberapa komunitas Muslim di Tiongkok dan mendapat keterangan bahwa segala aktivitas keagamaan di Beijing mendapat pembiayaan secara menyeluruh oleh pemerintah Tiongkok, termasuk lahan untuk Masjid atau pondok pesantren. Pemerintah Tiongkok juga memberikan gaji kepada para guru agama di Tiongkok dan fasilitas sekolah gratis bagi santri Muslim di Beijing. Bahkan menurut keterangan beliau, aktifitas keagamaan di Masjid Beijing juga sangat terbuka dimana adzan dikumandangkan dengan bebas serta sholawat dan pembacaan Al-Quran pun disiarkan di Masjid Beijing dengan bebas. Namun Muhammadiyah merasa informasi tersebut belum cukup karena belum adanya keterbukaan dari pihak pemerintah Tiongkok terkait wilayah Xinjiang serta lebih spesifik pada keadaan etnis *Uyghur* (PP Muhammadiyah, 2018).

Kondisi etnis *Uyghur* seperti pribumi yang tergusur oleh kebijakan rezim Tiongkok sehingga mereka melakukan upaya pemberontakan, isu ini kemudian diartikan memiliki kesamaan dengan konflik Aceh atau Papua di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan rezim tersebut lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi dan politik, dimana aktifitas ekonomi etnis *Uyghur* dapat dikatakan tidak ada pergerakan dan tidak menguntungkan masyarakat. Konflik etnis *Uyghur* dengan pemerintah Tiongkok tidak hanya seputar isu keagamaan, namun lebih pada isu ekonomi politik. Kemudian isu keagamaan diduga dikapitalisasi sehingga menjadi ideologi yang bersebrangan dengan pemerintah sebagai cara etnis *Uyghur* melawan kekuasaan rezim Tiongkok (PP Muhammadiyah, 2018).

Ruang kebebasan beragama antara Tiongkok dan Xinjiang kemudian sangat terasa. Konflik etnis *Uyghur* di Xinjiang yang menyebabkan tidak adanya kebebasan keberagaman disana disebabkan adanya kapitalisasi isu agama pada aspek ekonomi dan politik. Dengan kata lain, jika pelaku-pelaku keagamaan atau orang Muslim *Uyghur* sudah masuk pada aspek ekonomi dan politik Xinjiang, hal tersebut dapat diartikan sebagai tindakan ekstrimisme dan radikal.

Oleh karena itu, sikap Muhammadiyah dalam konflik *Uyghur* ini antara lain minta konflik *Uyghur* diselesaikan oleh Tiongkok secara independen, meminta keterbukaan akses informasi agar tidak ada kesalah pahaman antara masyarakat global dan juga warga Muhammadiyah terkait kondisi etnis *Uyghur* karena menurut beliau hingga kini akses ke *Uyghur* sangat susah didapatkan, bahkan lebih susah dalam menembus akses ke Palestina. Terakhir, Muhammadiyah mengecam jika benar adanya tindakan pelanggaran HAM.

Sedangkan terkait peran Muhammadiyah yang keras di awal dan menurunnya intensitas opini Muhammadiyah di akhir dan berbedanya tindakan Muhammadiyah kepada konflik *Uyghur* dan Filipina disebabkan karena

kurangnya akses informasi kejadian di lapangan sehingga Muhammadiyah tidak dapat melakukan kajian lebih terhadap kasus ini. Terlebih kasus ini tidak hanya seputar agama dan etnis seperti konflik Filipina, sehingga Muhammadiyah belum dapat memediasi kedua belah pihak. Namun dapat ditegaskan bahwa Muhammadiyah tetap keras dan tetap protes terhadap tindakan Tiongkok kepada etnis *Uyghur*. Muhammadiyah juga tetap berusaha memberikan bantuan kepada etnis *Uyghur* dengan memberikan bantuan dana dan pendidikan, meskipun bantuan tersebut sulit disalurkan karena minimnya akses menuju etnis *Uyghur* di Xinjiang (PP Muhammadiyah, 2018).

Berdasarkan peran Muhammadiyah dalam menanggapi isu diskriminasi etnis *Uyghur*, Muhammadiyah tidak dapat mencampuri urusan atau kebijakan domestik Tiongkok yang sudah dipahami oleh masyarakat di sana, Muhammadiyah hanya mampu membangun jembatan yang dapat menghubungkan antara pihak Pemerintah Tiongkok dan pihak *Uyghur* dalam permasalahan tersebut.

Sedangkan untuk isu kekerasan seperti paksaan memakan makanan haram, Muhammadiyah mengambil sikap tegas dengan menentang tindakan Tiongkok dengan memberikan himbauan kepada pemerintah Tiongkok agar dapat berlaku adil dengan masyarakat *Uyghur* serta memberikan hak asasi manusia kepada etnis *Uyghur* dengan tidak melakukan kekerasan. Walaupun Muhammadiyah belum dapat memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat *Uyghur* karena tidak adanya akses maupun izin dari pemerintah Tiongkok.



Sedangkan dalam permasalahan politik, Muhammadiyah masih perlu berhati-hati dalam menanggapi isu ini. Hal tersebut dikarenakan terdapat perspektif yang bertentangan antara negara Barat dengan Tiongkok. Dimana permasalahan yang memiliki pemberitaan diametral menjadikan permasalahan tersebut menjadi isu yang informasinya tidak dapat dipercayai sepenuhnya, karena informasi yang diberikan oleh dua pihak yang bertentangan akan selalu memiliki aspek kebenaran dan kesalahan di masing-masing pihak. Sehingga Muhammadiyah perlu melihat isu tersebut sebagai isu domestik dan Muhammadiyah tidak berkeinginan untuk ikut campur terlalu dalam pada konflik Tiongkok dan Barat (PP Muhammadiyah, 2018).

### **3.3 *Mediation* yang dilakukan Muhammadiyah terhadap Diskriminasi**

#### ***Etnis Uyghur***

*Mediation* atau mediasi, tujuannya ada tiga: untuk mengakhiri permusuhan, untuk menyelesaikan masalah yang mendasari konflik, dan untuk memulihkan hubungan. Pihak yang memiliki keyakinan agama sangat menghargai mediasi dalam menyelesaikan konflik. Melalui percakapan spiritual dengan pihak-pihak yang berkonflik, diplomat berbasis keyakinan mampu menembus hati dan mengungkap kepentingan dan nilai yang lebih dalam yang dapat menjadi dasar bagi penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. bentuk *mediation*, Muhammadiyah belum bisa melakukan mediasi antara pihak *Uyghur* dan Pemerintah Tiongkok untuk mengakhiri konflik, untuk menyelesaikan masalah yang mendasari konflik, dan untuk memulihkan hubungan.

### 3.4 *Healing the wounds of history* yang dilakukan Muhammadiyah terhadap Diskriminasi Etnis *Uyghur*

*Healing the wounds of history* atau menyembuhkan luka sejarah. Ini biasanya merupakan hasil dari peristiwa dalam memori institusional kolektif dari komunitas berbasis identitas, ingatan yang membawa rasa sakit dan penderitaan dan menghambat perkembangan yang sehat dari komunitas itu. Sampai luka-luka ini ditangani secara efektif, mereka pasti menimbulkan stereotip dan menjelek-jelekkan orang-orang yang menyebabkan luka. Hal ini, pada gilirannya, dapat berdampak buruk pada hubungan ke generasi mendatang. Selama salah satu atau kedua pihak tetap menjadi tawanan sejarah yang terluka, mereka tidak akan mampu menjangkau melampaui kepahitan dan rasa ketidakadilan mereka. Diplomat berbasis agama termasuk di antara yang paling siap untuk menghadapi situasi seperti ini. Ada sumber daya dalam tradisi keagamaan yang dapat memungkinkan penganutnya untuk: (1) merenungkan sejarah mereka dengan cara yang penebusan, (2) membawa makna dan martabat bagi penderitaan, dan (3) memberikan janji penyembuhan yang sejati. *healing the wound of history* juga belum dilakukan pihak Muhammadiyah dalam konflik tersebut.

**Tabel 3.1 Proses *Faith-based Diplomacy* yang dilakukan Muhammadiyah dalam menanggapi diskriminasi etnis *Uyghur* di Tiongkok**

<b>Strategi <i>Faith-based Diplomacy</i></b>	<b>Proses Diplomasi</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Offering a New Vision</i> (menawarkan nilai baru)	Pada tahun 2019 Muhammadiyah menyarankan pemerintah Tiongkok untuk melakukan pendekatan yang elegan dan berfokus	Mendesak kepada Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang

	<p>kepada hak asasi manusia agar berpegang pada prinsip supermasi hukum dan pendekatan yang berbasis hukum dalam menangani ekstrimisme, terorisme dan separatisme sebagaimana alasan Pemerintah Tiongkok terhadap perlakuan etnis <i>Uyghur</i>.</p>	<p>dan Masyarakat <i>Uyghur</i>. Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat <i>Uyghur</i> atas dalih apapun. Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah <i>Uyghur</i> dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh <i>Uyghur</i> dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas.</p>
<p><i>Building Bridges</i> (membangun jembatan (hubungan))</p>	<p>Pada tahun 2019 mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang</p> <p>Dalam menyikapi isu etnis <i>Uyghur</i>, Muhammadiyah sebagai salah satu Gerakan perdamaian mengeluarkan pernyataan pada akhir 2018</p>	<p>1. Menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Tiongkok terhadap PP. Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU, dan MUI atas permasalahan HAM di Tiongkok. Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil</p>

		<p>langkah hukum sebagaimana mestinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendesak kepada Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan Masyarakat <i>Uyghur</i>. Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat <i>Uyghur</i> atas dalih apapun. Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah <i>Uyghur</i> dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh <i>Uyghur</i> dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas.</li> <li>3. Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM atas Masyarakat <i>Uyghur</i>, Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.</li> <li>4. Mendesak Gerakan Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang.</li> <li>5. Mendesak Pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif. Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak</li> </ol>
--	--	---

		<p>tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya.</p> <p>6. Menghimbau umat Islam agar menyikapi masalah pelanggaran HAM di Xinjiang dengan penuh kearifan, rasional, damai, dan tetap memelihara ukhuwah islamiyah dan persatuan bangsa. Hendaknya tidak ada pihak-pihak yang sengaja menjadikan masalah <i>Uyghur</i> sebagai komoditas politik kelompok dan partai tertentu serta mengadu domba masyarakat dengan menyebarkan berita yang menyesatkan dan memecah belah umat dan bangsa melalui media sosial, media massa, dan berbagai bentuk provokasi lainnya.</p> <p>7. Menghimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk konsisten menyikapi persoalan dengan cerdas, berpegang teguh pada khittah dan kepribadian Muhammadiyah, tidak terpengaruh berita media sosial yang menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan</p>
--	--	---

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Pelaksanaan *faith-based diplomacy* yang mewajibkan adanya nilai-nilai agama sebagai prinsip untuk mendamaikan dan dilakukan oleh aktor keagamaan baik individu maupun institusi, Muhammadiyah meyakini bahwa untuk mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan perlu dilakukan dakwah fi sabilillah. Proses dakwah Muhammadiyah dibangun atas strategi *basyiran* (kabar gembira) dan *tandzir* (peringan) bagi umat Islam, dan strategi ajakan dan kabar gembira bagi umat yang belum Islam. Kegiatan dakwah Muhammadiyah juga dilakukan dengan

berbagai pendekatan, baik itu lisan, tulisan, maupun kegiatan nyata (*bil hal*). Dalam situasi spesifik *faith-based diplomacy* bahwa konflik yang terjadi di garis patahan antara budaya dan peradaban, ada sejumlah skenario di mana diplomasi berbasis agama dapat bekerja dengan arah yang berlawanan.

Kemungkinan pertama adalah konflik di mana agama merupakan faktor penting dalam identitas salah satu atau kedua komunitas. Perselisihan yang telah bertahan selama lebih dari empat dekade diantara etnis *Uyghur* dan Pemerintah Tiongkok adalah perwakilan dari kemungkinan tersebut. Etnis *Uyghur* yang merupakan pemeluk agama Islam, sebagai penduduk asli dari East Turkestan, menjustifikasikan klaim atas dasar sejarah, bahasa, dan kultur. Namun, pihak Tiongkok tidak mengakui hal tersebut. Pada 1884, Tiongkok mendeklarasikan East Turkestan sebagai bagian dari provinsinya dan mengubah nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang, di artikan secara literal sebagai “perbatasan baru”.

Skenario kedua di mana diplomasi berbasis agama dapat bekerja adalah situasi konflik di mana para pemimpin agama dapat dimobilisasi untuk memfasilitasi perdamaian. Resolusi yang diusung oleh Muhammadiyah sebagai Gerakan keagamaan dikenal dengan Gerakan tajdid Muhammadiyah. Tajdid berasal dari bahasa arab yang berarti pembaharuan. Muhammadiyah menyarankan pemerintah Tiongkok untuk melakukan pendekatan yang elegan dan berfokus kepada hak asasi manusia agar berpegang pada prinsip supermasi hukum dan pendekatan yang berbasis hukum dalam menangani ekstrimisme, terorisme dan separatisme sebagaimana alasan Pemerintah Tiongkok terhadap perlakuan etnis *Uyghur*.

Muhammadiyah juga menawarkan Pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dan menjelaskan dengan sebenar-benarnya terkait keadaan etnis *Uyghur* serta bekerjasama dengan berbagai lembaga resmi yang berwenang menangani permasalahan kemanusiaan untuk mengatasi konflik yang terjadi dan memperkecil opini publik. Muhammadiyah juga memberikan himbauan kepada masing-masing pihak yang berkonflik maupun pihak yang mengecam atas konflik tersebut agar tidak mudah termakan isu-isu pemberitaan yang kurang jelas sumbernya dan meminta agar umat Islam di Indonesia menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama Muslim termasuk solidaritas dengan Uighur untuk menciptakan kesatuan dan perdamaian. Muhammadiyah sepakat dalam menyatakan konflik di *Uyghur* merupakan permasalahan domestik Pemerintah Tiongkok di Xinjiang. Pihak Muhammadiyah hanya mampu menyarankan pemerintah Tiongkok untuk mengikutsertakan Gerakan keagamaan Islam di Tiongkok dalam pengambilan keputusan tindakan-tindakan yang dianggap radikal agar keputusan tersebut tidak mempersempit ruang gerak Muslim di Tiongkok dalam melaksanakan ibadah.

Dalam menyikapi isu etnis *Uyghur* tersebut, Muhammadiyah sebagai salah satu Gerakan Keagamaan Islam di Indonesia sekaligus Gerakan perdamaian mengeluarkan pernyataan pada akhir 2018. Pernyataan tersebut berisi 7 poin yang berkesimpulan jika segala pemberitaan terkait persekusi terhadap etnis *Uyghur* benar adanya, maka Muhammadiyah mengecam tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh Tiongkok, kemudian Muhammadiyah meminta pemerintah Tiongkok membuka akses secara terbuka agar masyarakat internasional dapat mengamati keadaan *Uyghur* secara real. Muhammadiyah juga

mendesak berbagai lembaga berwenang seperti PBB, OKI serta pemerintah Indonesia agar segera menindak lanjut isu *Uyghur*.

Selanjutnya setelah diajukan saran terkait pembukaan akses menuju Xinjiang, beberapa delegasi Muhammadiyah melakukan kunjungan ke Xinjiang pada Februari 2019. Pada kunjungan ke Xinjiang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah Tiongkok sangat terbuka perihal keagamaan, namun terdapat kesulitan etnis *Uyghur* dalam kamp pelatihan untuk melaksanakan sholat karena dugaan radikalisme. Pada saat di Xinjiang, delegasi Muhammadiyah sempat mengusulkan perizinan sholat dalam 3 waktu di kamp pelatihan terhadap pemerintah Tiongkok tetapi tidak mendapat sambutan yang baik. Selepas itu, delegasi Muhammadiyah mengusulkan agar diikuti sertakannya CIA dalam penentuan tingkat radikalisme di Tiongkok. Delegasi Muhammadiyah mengunjungi beberapa komunitas Muslim di Tiongkok dan mendapat keterangan bahwa segala aktivitas keagamaan di Beijing mendapat pembiayaan secara menyeluruh oleh pemerintah Tiongkok, termasuk lahan untuk Masjid atau pondok pesantren. Pemerintah Tiongkok juga memberikan gaji kepada para guru agama di Tiongkok dan fasilitas sekolah gratis bagi santri Muslim di Beijing. Bahkan menurut keterangan beliau, aktifitas keagamaan di Masjid Beijing juga sangat terbuka dimana adzan dikumandangkan dengan bebas serta sholat dan pembacaan Al-Quran pun disiarkan di Masjid Beijing dengan bebas. Namun Muhammadiyah merasa informasi tersebut belum cukup karena belum adanya keterbukaan dari pihak pemerintah Tiongkok terkait wilayah Xinjiang serta lebih spesifik pada keadaan etnis *Uyghur*.

Oleh karena itu, sikap Muhammadiyah dalam konflik *Uyghur* ini antara lain minta konflik *Uyghur* diselesaikan oleh Tiongkok secara independen, meminta



keterbukaan akses informasi agar tidak ada kesalah pahaman antara masyarakat global dan juga warga Muhammadiyah terkait kondisi etnis *Uyghur* karena menurut beliau hingga kini akses ke *Uyghur* sangat susah didapatkan, bahkan lebih susah dalam menembus akses ke Palestina. Terakhir, Muhammadiyah mengecam jika benar adanya tindakan pelanggaran HAM.

Sedangkan terkait peran Muhammadiyah yang keras di awal dan menurunnya intensitas opini Muhammadiyah di akhir dan berbedanya tindakan Muhammadiyah kepada konflik *Uyghur* dan Filipina disebabkan karena kurangnya akses informasi kejadian di lapangan sehingga Muhammadiyah tidak dapat melakukan kajian lebih terhadap kasus ini.

Berdasarkan peran Muhammadiyah dalam menanggapi isu diskriminasi etnis *Uyghur*, Muhammadiyah tidak dapat mencampuri urusan atau kebijakan domestik Tiongkok yang sudah dipahami oleh masyarakat di sana, Muhammadiyah hanya mampu membangun jembatan yang dapat menghubungkan antara pihak Pemerintah Tiongkok dan pihak *Uyghur* dalam permasalahan tersebut.

Sedangkan untuk isu kekerasan seperti paksaan memakan makanan haram, Muhammadiyah mengambil sikap tegas dengan menentang tindakan Tiongkok dengan memberikan himbauan kepada pemerintah Tiongkok agar dapat berlaku adil dengan masyarakat *Uyghur* serta memberikan hak asasi manusia kepada etnis *Uyghur* dengan tidak melakukan kekerasan. Walaupun Muhammadiyah belum dapat memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat *Uyghur* karena tidak adanya akses maupun izin dari pemerintah Tiongkok

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dalam hal isu pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang, pada awalnya Muhammadiyah melakukan pengecaman keras terhadap penindasan yang dilakukan Tiongkok terhadap muslim *Uyghur*. Muhammadiyah sebagai Gerakan Keagamaan di ranah kemanusiaan dan moral yang merepresentasikan sebagai kekuatan Islam tak tinggal diam terkait masalah ini. Suara yang mereka keluarkan bukan hanya berkaitan dengan agama, ras, etnik, maupun suku bangsa tetapi juga asas kemanusiaan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memprotes pemberitaan media Amerika Serikat “*Wallstreet Journal*” yang menuding adanya fasilitas dan lobi-lobi pemerintah Tiongkok terhadap sejumlah ormas Islam Indonesia terkait permasalahan HAM muslim *Uyghur* di Xinjiang.

Beberapa pokok permasalahan yang menjadi penyebab konflik antara suku *Uyghur* dengan Tiongkok diantara lain: 1) Struktural, faktor ini lebih menekankan pada fakta akan perubahan pola demografis; 2) Politik, Ideologi komunis serta nasionalitas atas nama etnis Han yang semakin diintensifikan kepada seluruh etnis-etnis lainnya yang ada di dataran Tiongkok; 3) Ekonomi,

ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh kesulitan warga yang beretnis muslim *Uyghur* untuk mencari pekerjaan. dan 4) Budaya, diskriminasi budaya yang semakin parah, misalnya dapat dipicu dari penyebaran penghinaan etnis serta propaganda yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap kaum muslim *Uyghur*.

Dalam melakukan *faith-based diplomacy*, tawaran nilai-nilai baru kepada pihak yang berkonflik (*offering a new vision*), Muhammadiyah menyarankan pemerintah Tiongkok untuk melakukan pendekatan yang elegan dan berfokus kepada hak asasi manusia agar berpegang pada prinsip supremasi hukum dan pendekatan yang berbasis hukum dalam menangani ekstrimisme, terorisme dan separatisme sebagaimana alasan Pemerintah Tiongkok terhadap perlakuan etnis *Uyghur*. Muhammadiyah juga menawarkan Pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dan menjelaskan dengan sebenar-benarnya terkait keadaan etnis *Uyghur* serta bekerjasama dengan berbagai lembaga resmi yang berwenang menangani permasalahan kemanusiaan untuk mengatasi konflik yang terjadi dan memperkecil opini publik.

Berdasarkan peran Muhammadiyah dalam menanggapi isu diskriminasi etnis *Uyghur*, Muhammadiyah tidak dapat mencampuri urusan atau kebijakan domestik Tiongkok yang sudah dipahami oleh masyarakat di sana, Muhammadiyah hanya mampu membangun jembatan yang dapat menghubungkan antara pihak Pemerintah Tiongkok dan pihak *Uyghur* dalam permasalahan tersebut (*building bridge*).

## 4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian yang telah dilakukan menghasilkan suatu analisis dan kesimpulan. Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, penulis memberikan sebuah rekomendasi yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga penelitian yang mengangkat tema dalam tulisan ini dapat bertambah di kemudian hari. Penelitian ini belum membahas tentang kerja sama dalam bidang pendidikan antara etnis *Uyghur* di Tiongkok dengan pihak Muhammadiyah sebagai Gerakan Keagamaan yang ada di Indonesia. Hal ini akan menjadi tema yang menarik dalam meneliti bagaimana kerjasama tersebut dapat terlaksana untuk kepentingan pendidikan Agama bagi etnis *Uyghur* di Tiongkok.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amensty International. (1999). Peoples Republic of China: Gross Violations of Human Rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region. Amnesty International: London.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baidhawiy, Z. (2015). The Muhammadiyah's Promotion of Moderation. *The American Journal of Islamic Social Sciences*.
- Bovingdon, Gardner. (2004). *Autonomy in Xinjiang: Han Nationalist Imperatives and Uyghur Discontent*. East-West Center. Stable URL: <http://www.jstor.com/stable/resrep06498>.
- Burhani. A., Najib. (2016). *Muhammadiyah Berkemajuan*. Bandung: Mizan.
- Chung, C. (2002). China's 'War on Terror': September 11 and Uighur Separatism. Tersedia dalam [\[http://www.cfr.org/publication/4765/chinas\\_war\\_on\\_terror.html\]](http://www.cfr.org/publication/4765/chinas_war_on_terror.html) (Diakses pada [15 Mei 2020]).
- Claeke, M. (2008). *Terrorism and Political Violence: China's "war on Terror" in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent Uyghur Separatism*. Brisbane, Australia: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546550801920865?journalCode=ftpv20>.
- Clarke, M. (2010). China, Xinjiang and the internationalisation of the Uyghur issue. *Global Change, Peace & Security*, 22(2): 213–229.
- CNN Indonesia. (2020). Mahfud Sebut Dubes China Jelaskan Uighur Sebagai Separatis, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191219201340-32-458505/mahfud-sebut-dubes-china-jelaskanuighur-sebagai-separatis> Diakses pada 19 Juni 2022 pukul 02.14 WIB.
- Congressional Research Service Report. (2020). *Uighurs in China 2020*.
- Elba, Damhuri. (2018). Memahami Konflik Uighur di Xinjiang,” <http://m.republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/01/18/pliyh6440-memahami-konflik-uighur-di-xinjiang-part1>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.
- Farihen, Kusen, Zamah Sari, Fakhurrozi, A. Halim Sani, Mufid, Yusrizal, Mundzir Ilham, Andri Gunawan. (2018). *Kemuhammadiyah: Melampaui Ilmu dan Amal*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

- Febriansyah & M. Raihan. (2013). 100 Tahun Muhammadiyah Menyinari Negeri. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah.
- Felicia, A. S. (2013). Etnisitas Dan Politik Luar Negeri: Respon Turki Terhadap Penindasan Etnis Uighur di Xinjiang. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. 2(3): 295-317.
- Ferris. (2005). Faith-based and secular humanitarian organizations. *International Review of the Red Cross*.
- Furtun, F. (2010). Turkish-Chinese Relations in the Shadow of the Uighur Problem. *Global Political Trends Center*. Tersedia dalam [[https://www.jstor.org/stable/resrep07712?seq=9#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/resrep07712?seq=9#metadata_info_tab_contents)] (Diakses pada [28 Mei 2022]).
- Full Text of White Paper on History and Development in Xinjiang. (2003). Beijing: The State Council of The People's Republic of China.
- Hidayat, M. N. (2013). Diaspora Uighur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina. *Jurnal Interdependence*, 1(3): 165-179.
- HKTDC Research. (2019). Xinjiang: Market Profile, <http://china-traderesearch.hktdc.com/business-news/article/Facts-andFigures/XinjiangMarketProfile/ff/en/1/1X000000/1X06BVVK.htm>, diakses 17 Mei 2022.
- Holder, Ross. (2019). On the Intersectionality of Religious and Racial Discrimination: A Case Study on the Applicability of ICERD with Respect to China's Uyghur Muslim Minority. *Religion & Human Rights*, 14(1), 1–30. doi:10.1163/18710328-13021144.
- <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>.
- Human Rights Watch. (2005). "Devastating Blows: Religious Repression of Uighurs in Xinjiang". HRIC Special Report.
- Idhom, Addi. M. (2019). Klarifikasi Dubes China Soal Uighur saat Bertemu Moeldoko, <https://tirto.id/klarifikasi-dubeschina-soal-uighur-saat-bertemu-moeldoko-enDn> Diakses pada 18 Juni 2022 puku 02.32 WIB.
- Johnston, Douglas M. (2003). *Faith Based Diplomacy: Trumping Real Politic*. New York: Oxford University Press.
- Johnston, Douglas M. (2009). *Faith-Based Diplomacy: Bridging the Religious Divide*. James A. Baker III Institute. retrived from <https://www.bakerinstitute.org/media/files/Research/54f7599c/REL-pub-JohnstonFaithBasedDiplomacy-2009.pdf>.
- Kasim, N. M., Towadi, M., & Bakung, D. A. (2020). THE ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION AFFECTS TO CHINA THROUGH THE ISLAMIC LAW APPROACH ADDRESSING THE *Uyghur* CONFLICT:

IS IT POSSIBLE? -: Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, suppl. Special Issue; Arden Vol. 23, (2020): 1-14.

- Keraf, A. Sonny. (2000). Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius.
- Lehr, A.. K & Bechrakis, Mariefaye. (2019). Connecting the Dots in Xinjiang: Forced Labor, Forced Assimilation, and Western Supply Chains. Center for Strategic & International Relations. Tersedia dalam [<https://www.csis.org/analysis/connecting-dots-xinjiang-forced-labor-forced-assimilation-and-western-supply-chains>].
- Maizland, L. (2019). China's Repression of Uighurs in Xinjiang. Tersedia dalam [<https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-repression-uighurs-xinjiang>] (Diakses pada [28 Mei 2022]).
- MDMC. (2018). Ikuti KKT Kemanusiaan Dunia, MDMC Sosialisasikan Fikih Kebencanaan. diakses dari <http://mdmc.or.id/index.php/b/241-ikuti-kkt-kemanusiaan-dunia-mdmc-sosialisasikan-fikih-kebencanaan> pada tanggal 28 Mei 2022.
- Nebehay, S. (2019). 1.5 million Muslims could be detained in China's Xinjiang: academic. [online] Reuters. Available at: <https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-rights/1-5-million-muslims-could-be-detained-in-chinas-xinjiang-academicidUSKCN1QU2MQ> [Accessed 3 Mar. 2019]
- Nichols, Bruce. (1994). Religious Conciliation between the Sandinistas and the East Coast Indians in Nicaragua, in Douglas Johnston and Cynthia Sampson (editor) Religion, the Missing Dimension of Statecraft, New York: Oxford University Press.
- Pandya, S., & Gallagher, N. (2012). The Gülen Hizmet movement and its. Florida: BrownWalker Press.
- Persada, Syailendra. (2019). Tujuh Poin Pernyataan Sikap Muhammadiyah Terkait Isu Uighur diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1284582/tujuh-poin-pernyataan-sikap-muhammadiyah-terkait-isu-uighur>.
- Rahayu, Lisye Sri. (2019). Muhammadiyah Ungkap Kejanggalan Saat Diajak Tur ke Xinjiang China. 16 Desember. Accessed November 06, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4825065/muhammadiyah-ungkapkejanggalan-saat-diajak-tur-ke-xinjiang-china>.
- Ramadhani, Jabbar. (2019). Usai Kunjungi Muslim Xinjiang, Ini Langkah Delegasi Indonesia. 28 Februari. <https://news.detik.com/berita/d-4447233/usaikunjungi-muslim-xinjiang-ini-langkah-delegasi-indonesia>.
- Rossabi, Morris. (2004). Governing China's Multiethnic Frontiers. Seattle: University of Washington Press.



- Salam, Junus. (2009). K.H Ahmad Dahlan: Amal dan perjuangannya. Jakarta: Al-Wasat.
- Sintash, B. K. (2019). Detained and Disappeared: Intellectuals Under Assault in the *Uyghur* Homeland. Retrieved from <https://docs.uhrp.org:https://docs.uhrp.org/pdf/Detained-andDisappeared-Inellectuals-Under-Assault-in-the-Uyghur-Homeland.pdf>
- Suara Muhammadiyah. (2016). MDMC Dilibatkan dalam Penyusunan Bangkok Principles. Retrieved from Suara Muhammadiyah: <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/03/15/mdmc-dilibatkan-dalampenyusunan-bangkok-principles/>.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wu, Xiaogang, and Xi Song. (2013). Ethnicity, Migration, and Social Stratification in China: Evidence from Xinjiang *Uyghur* Autonomous Region. PSC Research Report No. 13-810. 11 2013.

